

PPATK Siap Telusuri Aliran Uang Eks Jampidsus Febrie

TANGERANG, BN – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan siap membantu penyidik Kejaksaan Agung menelusuri aliran uang mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus



■ Bersambung ke hal.11 kol.5

Febrie Adriansyah. (ist)

BANCAKAN DANA INSENTIF BAPENDA JOMBANG MILIARAN

□ Diduga Arahan Bos Besar

LIPUTAN KHUSUS

JOMBANG, BN – Di tengah-tengah tengah kemiskinan, para oknum pejabat “Genk Pemkab Jombang” ramai-ramai diduga bancakan uang hasil keringat dari rakyat.

KETERANGAN di-himpun Bidik Nasional (BN) dari berbagai sumber menyebutkan, ada beberapa oknum ASN di Pemkab Jombang yang “rakus” makan dana insentif PLN. Kebobrokan tingkah laku para oknum pejabat di Pemkab Jombang kini mulai terkuak yang terlibat dalam pembagian dana insentif di Bapenda.

Para oknum ASN yang diduga rakus dengan da-

na insentif yang diambil dari keringat rakyat seperti di Bapenda Jombang diduga dilakukan oleh sekelompok “Oknum” mereka layak disebut “Genk Pemkab” Jombang, karena mereka sekelompok oknum pejabat Pemkab Jombang. Kerjanya hanya makan keringat hak orang lain, padahal sudah menerima gaji lebih dari cukup. Bahkan dari mereka diduga punya bisnis sampingan

yang disembunyikan agar tidak diketahui publik.

Para oknum ASN yang masuk Genk Pemkab Jombang diduga banyak mengatur pembagian soal dana insentif PPJ (Pajak Penerangan Jalan) di Bapenda Jombang.

Para “tikus” (oknum pejabat Pemkab Jombang) yang “makan” dana insentif PPJ, biasanya merujuk pada praktik korupsi atau penyalahgunaan anggaran, tujuannya untuk memperkaya diri sendiri demi perutnya sendiri.

Sorotan tajam masyarakat Jombang tertuju pada mantan Kepala Bapenda Hartono (sekarang Kepala Bappeda), Sholahuddin,

Kepala Bapenda sekarang, Joko Muji Sekdin (Sekretaris Dinas) Bapenda Jombang, sebagai pemegang data pegawai yang menerima dana. Mereka diduga tahu banyak siapa saja yang menerima uang haram tersebut.

Selain itu dari keterangan mereka sebagai pintu masuk untuk membongkar pejabat lain yang masih kasat mata sebagian jatah dana insentif yang belum terkuak. “Kuncinya dari tiga pejabat tersebut untuk membongkar luka Pemkab Jombang, agar publik merasa lega dengan terbongkar nya aib yang merusak nama baik Pem-

■ Bersambung ke hal.11 kol.1



Sholahuddin, Kepala Bapenda Jombang. (ist)



Hartono mantan Kepala Bapenda (sekarang di Bappeda Jombang). (ist)

Pungli Berkedok Sumbangan Resahkan Siswa Kelas 12 SMKN 1 Ngasem Kediri



□ Akun Ujian Diancam Blokir, Para Siswa Trauma

KEDIRI, BN – Dunia pendidikan di Kabupaten Kediri kembali didera isu miring. Kali ini, SMKN 1 Ngasem Kediri diterpa dugaan praktik pungutan liar (pungli) dengan modus “Sumbangan Partisipasi Masyarakat” (SPM). Ironisnya, dugaan pungutan wajib ini disertai dengan tindakan intimidasi yang menasar siswa kelas

12, hingga menyebabkan tekanan psikologis dan trauma pada peserta didik.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah wali murid mengeluhkan adanya paksaan untuk mencicil uang sumbangan tersebut. Nilai nominal yang dipatok oleh pihak sekolah atau komite disebut mencapai Rp 85.000 per bulan. Angka ini dinilai memberatkan, terlebih format penarikannya yang bersifat wajib dan mengikat, bertolak belakang dengan hakikat esensi sebuah ‘sumbangan’.

■ Bersambung ke hal.11 kol.1

Pansus DPRD Banyuwangi : Raperda RPIK Atur Klusterisasi Potensi Unggulan dan Wajib Sinkron dengan RDTR



Pansus DPRD Banyuwangi ketika rapat mematangkan dan menyempurnakan Rancangan peraturan daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Banyuwangi Tahun 2025-2045. (dj)

ngi, Arvy Rizaldi mengatakan bahwa rancangan peraturan daerah tentang RPIK ini merupakan salah satu regulasi yang cukup penting yang nantinya akan menjadi buku besar sebagai grand desain pembangunan industri di Kabupaten Banyuwangi hingga tahun 2045.

“ Dalam Raperda RPIK ini kita berharap ada muatan yang mengatur tentang potensi unggulan wilayah yang akan menjadi pondasi atau pijakan agar arah kebijakan dan Pembangunan industri di daerah lebih terarah,realistis dan tepat sasaran,” ucap Gus Arvy panggilan akrab politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini saat dikonfirmasi, Kamis (09/07/2026).

Dan poin penting mengenai muatan potensi unggulan wilayah dalam Raperda RPIK berisi daftar potensi sumber daya alam, pertanian, Perkebunan yang menjadi ciri khas wilayah tersebut seperti Kecamatan Songgon ada potensi Perkebunan kopi, Kecamatan Muncar dengan perikanan dan Kecamatan Kalipuro dan Giri dengan potensi olahan kayunya dan wilayah-wilayah lainnya.

“Potensi-potensi unggulan tersebut nantinya diarahkan pengembangannya ke sektor industri pengolahan atau hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah dan memudahkan masyarakat khususnya petani menyalurkan hasil pertanian maupun perkebunannya,” ucap Arvy Rizaldi.

Dalam Raperda RPIK akan ada muatan klusterisasi wilayah dengan menetapkan zona-zona tertentu yang diprioritaskan untuk mengembangkan potensi unggulan itu agar pemerataan ekonomi terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi.

Selain terkait klusterisasi potensi unggulan wilayah, Pansus juga meminta Raperda RPIK selaras dan sinkron dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dalam Raperda RPIK juga tidak boleh menetapkan wilayah ataupun Kawasan yang peruntukan industri yang bertentangan dengan peta zonasi yang telah ditentukan di Perda tentang RDTR. Kesesuaian antar dokumen ini memberikan kepastian bagi para investor dalam mengurus izin lokasi dan operasional agar tidak melanggar aturan tata ruang.

“Saat ini Pansus masih menunggu RDTR dan RTRW dari eksekutif,” ucapnya.

Arvy Rizaldi menambahkan, keberadaan Perda RPIK ini nantinya akan memudahkan investor untuk mengetahui arah pengembangan industri, memilih dan memperoleh lahan sekaligus mempercepat proses perijinan usaha di Kabupaten Banyuwangi.

“Jika telah ditetapkan, Perda RPIK ini akan memberikan rasa aman karena arah kebijakan industri daerah telah memiliki kepastian hukum dan perencanaannya disusun untuk jangka hingga 20 tahun,” pungkasnya. (Adv/Dj)

BANYUWANGI, BN – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Banyuwangi secara aktif terus mematangkan dan menyempurnakan Rancangan peraturan daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Banyuwangi Tahun 2025-2045.

Pencermatan secara detail pasal demi pasal dilakukan untuk memastikan substansi aturan tersebut komprehensif, aplikatif dan berpihak pada kesejahteraan Masyarakat.

Ketua Pansus pembahasan Raperda RPIK DPRD Banyuwangi,

Gerai Layanan Perizinan Perikanan Terpadu Untuk Nelayan Kabupaten Jember



Gerai Layanan Perizinan Perikanan Terpadu di Aula UPT PPP Puger pada tanggal 18 hingga 21 Mei 2026 mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. (ist)

JEMBER, BN- UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Puger bersama Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember menghadirkan Gerai Layanan Perizinan Perikanan Terpadu satu atap, sebagai upaya meningkatkan kemudahan pelayanan administrasi bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan di wilayah Kabupaten Jember. Kegiatan ini bertujuan untuk mempermudah para pemilik kapal dalam mengurus berbagai kelengkapan administrasi kapal perikanan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui kegiatan bertema “Mudah, Cepat dan Terintegrasi”, para nelayan diajak untuk melengkapi dan mengurus dokumen kapal perikanan secara langsung dalam satu lokasi

■ Bersambung ke hal.11 kol.1

Menguji Transparansi Pengelolaan Anggaran Birokrasi



PASURUAN, BN - Dalam mendukung peningkatan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Pasuruan Tahun 2026.

Redaksi Surat Kabar BIDIK NASIONAL – bidiknasional.com Biro Pasuruan secara resmi pada, Kamis 16 Juli 2026 mengajukan surat Permintaan Wawancara kepada Kepala Diskoperindag Kabupaten Pasuruan, Taufiqul Ghoni, SE., M.Si sebagai narasumber dalam program Liputan Khusus dengan TEMA : “PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN BELANJA SATUAN KERJA”

Tema ini kami pilih untuk mengetahui Anggaran Pendapatan dan Belanja Diskoperindag yang menyajikan informasi perihal Jumlah Pendapatan, Uraian Belanja, Total Belanja Tahun 2026; berdasarkan informasi yang tepat dan akurat.

Tujuan dari wawancara tersebut adalah untuk memenuhi hak masyarakat mengetahui informasi berdasarkan data dan/atau dokumen yang tepat, akurat dan benar.

Adapun informasi yang menurut sifatnya penting dapat diakses masyarakat antara lain dokumen perencanaan dan penganggaran yang memuat program, kegiatan, target kinerja, serta rincian anggaran pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Untuk mengetahui ringkasan anggaran pendapatan dan belanja Satuan Kerja dibawah kepemimpinan Taufiqul Ghoni tersebut, ikuti Liputan BIDIK NASIONAL - bidiknasional.com edisi selanjutnya. (Toddy/Red)

Proyek Drainase Jalan Senduro - Kandangan Rp 2,4 M, Bermasalah



Papan proyek dan pekerjaan drainase jalan Senduro-Kandangan tampak amburadul

LUMAJANG, BN – Proyek drainase yang berada di Desa Senduro Kab.Lumajang mengundang keprihatinan sekaligus kecaman. Kinerja rekanan dan pengawas dipertanyakan. Mereka seharusnya menjalankan tugas agar proyek tersebut dikerjakan dengan benar/ sesuai RAB dan berkualitas. Namun disayangkan diduga mereka memanfaatkan akses dan fasilitas



Reza, sebagai pelaksana Tugas lapangan

sesuai RAB (Rencana Anggaran Beaya). Reza pelaksana tugas Kontraktor CV Alfatirena Persada Konstruksi, ditemui BN di aula Dindikbud Kab.Lumajang Senin (04/05/2026) menjawab pertanyaan BN soal konstruksi beton tidak ada tulangnya? nanti kalau ada truck/kendaraan bagaimana? Ia menjawab, “Gampang sudah dikerjakan dulu,

pekerjaan untuk memperkaya diri sendiri demi kepentingan pribadi dan merugikan negara. Keterangan di-himpun Bidik Nasional (BN), proyek Drainase dengan anggaran Negara Rp 2.427.787.586,- M, sampai saat ini tidak sesuai harapan, pekerjaan diduga tidak kalau urusan itu lihat MBnya, tetapi sama konsultan pengawasnya MBnya tidak dikerjakan-kerjaan,” jelas Reza. “Karena saya sudah aman, sudah pemeriksaan fungsional dari BPK. Kalau saya dipanggil Pak Dewan kemarin, Pak Dewan setelah ngobrol terima info kalau proyek ini salah perencanaan, dan kenapa Pak Heri sekarang tidak ditaruh di PPK lagi. Kata Pak Dewan, pada waktu itu juga ngomong dengan pelaksana saya yang lain, dan kalau kita tidak pernah ngomong apa-apa, bahkan Pak Dewan, sendiri yang punya statement, bahwa ini salah perencanaan yang bertanggung-jawab Dinas DPUPR,” jelas Reza

Bahkan Reza, juga menyampaikan pekerjaannya yang berada di desa Sumberwuluh di wisata poncokusumo, pekerjaan rabat beton yang dikerjakan disana dengan volume 1.700 meter dengan anggaran 1,8 M. Sangat bagus dan bisa dicek, “saya juga sudah kerja di Lumajang terkait dengan proyek bukan 1 sampai 2 tahun saja, tapi sudah cukup lama dan saya selalu kooperatif,” jelasnya. Sementara Kadis DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang) Kab. Lumajang, belum berhasil dikonfirmasi BN. (SON/Bersambung edisi berikutnya)

Semipro 2026 Resmi Ditutup, Walikota Probolinggo : Perputaran Ekonomi Capai Rp 2,8 Miliar



PROBOLINGGO, BN – Rangkaian Seminggu di Probolinggo (Semipro) 2026 resmi ditutup oleh Wali Kota Probolinggo Dokter Aminuddin, Minggu (13/7) malam di Stadion Bayuangga. Mengusung tema “Linggo Lungguh, Duduk Bersama, Bangkit Bersama”, penutupan berlangsung meriah dan dihadiri

ribuan masyarakat yang memadati kawasan stadion hingga malam terakhir penyelenggaraan.Turut hadir dalam acara tersebut Sekda Budiono Wirawan, Ketua TP PKK dr. Evariani Aminuddin, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala perangkat daerah, para sponsor, komunitas, pelaku UMKM, serta tamu undangan lainnya.

Acara penutupan diawali dengan penampilan fashion show para finalis Kang Yuk Kota Probolinggo 2026 yang menampilkan pesona budaya lokal. Kemeriahan berlanjut dengan atraksi Polisi Cilik SDN Sukabumi 2, tari kolosal Hindia persembahan Sanggar Senam Elisabeth bersama TP PKK kecamatan dan kelurahan se-Kota Probolinggo, hingga ditutup dengan penampilan grup music kebanggaan Kota Probolinggo, Doyan Wadon, yang sukses menghibur dan mengundang antusiasme ribuan penonton.Malam penutupan juga menjadi momen pemberian penghargaan kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan Semipro 2026.

Penghargaan apresiasi tertinggi diberikan kepada Prolink Production selaku event organizer.Apresiasi juga diberikan kepada paramitra sponsor, yakni Bank Jatim, Alraz, dan PAL, atas dukungan terhadap penyelenggaraan Semipro tahun ini.Selain itu, penghargaan diberikan kepada para pemenang lomba vlog Facebook danTikTok bertema Belah Jimat Mangunharjo sebagai bentuk apresiasi atas kreativitas masyarakat dalam mempromosikan budaya daerah melalui media digital. Pemerintah Kota Probolinggo juga memberikan penghargaan kepada para Pemuda Pelopor Kota Probolinggo atas dedikasi dan kontribusi mereka dalam pembangunan daerah, serta kepada perwakilan komunitas etnisTionghoa yang turut memperkaya Semipro melalui penampilan senibudaya. Penghargaan turut diberikan kepada dua pembalap nasional asal Kota Probolinggo yang berhasil mengharumkan nama daerah di ajang balap bergengsi. Hafidz Fahril Rasya dan menerima penghargaan atas prestasinya meraih podium sekaligus menjadi juara umum kelas Novice pada Kejuaraan Provinsi Jawa Timur Racing Series 3 yang berlangsung pada 4-5 Juli 2026.

Sementara M. Nabil Zah Sena mendapat apresiasi setelah berhasil meraih podium ketiga pada Kejuaraan Nasional Mandalika Racing Series Kelas Sport 250 CC Junior Round 2 yang digelar pada 20 Juni 2026.Mengusung konsep “10 Hari, 10 Tema, 10 Pengalaman Berbeda”, Semipro 2026 menghadirkan berbagai kegiatan mulai dari pameran UMKM, festival kuliner, hiburan, pertunjukan seni budaya, edukasi, hingga berbagai perlombaan yang mampu menarik minat masyarakat dari dalam maupun luar Kota Probolinggo. (SON)

DPRD Sidoarjo Berhasil Mediasi Warga dan Pengusaha Bengkel Karoseri



Mediasi yang dipimpin Komisi C dan komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo. (yah)

SIDOARJO, BN – Perselisihan antara pemilik usaha bengkel karoseri dengan masyarakat di Desa Seketi Kecamatan Balongbendo akhirnya berhasil di mediasi oleh Komisi C dan komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo. Bersama Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DLHK), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) atau Dinas Perizinan Sidoarjo, Polsek Balongbendo, Koramil Kecamatan Balongbendo, Camat Balongbendo

dan Kepala Desa Seketi melakukan kunjungan ke bengkel karoseri CV Multi Triloka Cemerlang untuk melihat kondisi bengkel yang mendapatkan keluhan dan penutupan sepihak oleh warga dilanjutkan dengan mediasi di Balai Desa Seketi, Selasa (14/7/2026).

“Tujuan untuk pertemuan hari ini adalah menjadi solusi terbaik dan saya harapkan semua pihak baik masyarakat maupun pengusaha untuk sama-sama menurunkan ego,” jelas Ketua Komisi C DPRD Kab Sidoarjo Choirul Hidayat, S.H. saat memimpin mediasi di Balai Desa Seketi. Dayat menjelaskan pemerintah sangat mendukung adanya pertumbuhan perekonomian melalui usaha mikro yang diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan. Namun, pemerintah juga tetap memperhatikan kenyamanan lingkungan.

Di tempat yang sama, Kepala DPMPTSP, Ridho Prasetyo menyampaikan bahwa CV Multi Triloka Cemerlang sudah mempunyai izin dengan menggunakan OSS Tahun 2023 yang belum terintegrasi. Sedangkan pada Oktober 2025 ada perubahan OSS 2025 yang sudah terintegrasi. “Kami menyarankan kepada pemilik usaha untuk melakukan upgrade perizinan,” jelasnya Ridho.

Sedangkan Kepala DLHK Sidoarjo, Iswadi Pribadi menjelaskan dari OSS, ada tiga KBLI dengan resiko minim. “Ada beberapa rekomendasi dari DLHK untuk pemilik usaha agar lingkungan tetap terjaga dan kenyamanan masyarakat juga terjaga,” tuturnya.

Pimpinan rapat, Ketua Komisi C yang akrab Abah Dayat menjelaskan dari tuntutan masyarakat, pihaknya minta kesanggupan pemilik usaha untuk melakukan tiga hal, yang pertama jam kerja antara 07.00 WIB hingga 16.00 WIB, melakukan upgrade perizinan agar terintegrasi sesuai dengan undang-undang dan melakukan perbaikan bengkel yang sesuai dengan standar, yaitu membangun pagar keliling minimal setinggi lima meter dan membuat pengelolaan limbah sesuai dengan arahan dan petunjuk dari DLHK.

Pemilik usaha, Syaiful Huda menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi ketiga persyaratan yang diajukan. “Dalam jangka waktu dua bulan saya akan menyelesaikan pembangunan pagar keliling setinggi lima meter dan ditutup atasnya,” ujarnya.

Dalam mediasi ini ditutup dengan penandatanganan kesepakatan warga dan pemilik usaha akan hasil mediasi dan warga membuka kembali bengkel. (yah)

Bupati Sidoarjo Subandi Salurkan 4000 Beasiswa

SIDOARJO, BN - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyalurkan beasiswa pendidikan kepada 4.000 pelajar dan mahasiswa, Kamis (9/7). Program tersebut ditujukan untuk membantu anak yatim serta keluarga kurang mampu agar tetap dapat melanjutkan pendidikan.

Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, beasiswa diberikan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mencegah anak putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi. Menurutnya, pendidikan harus tetap dapat diakses oleh seluruh anak. “Jangan sampai anak-anak yatim ini putus

sekolah. Keterbatasan ekonomi tak boleh jadi alasan,” ujar Subandi.

Ia menjelaskan, hingga saat ini masih terdapat 4.405 anak di Kabupaten Sidoarjo yang tidak melanjutkan pendidikan. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius sekaligus pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah.

Pada tahun 2026, Pemkab Sidoarjo menyiapkan kuota sebanyak 4.000 penerima beasiswa. Rinciannya terdiri dari 2.000 mahasiswa dan 2.000 pelajar, termasuk anak yatim jenjang SD, SMP, dan SMA, mahasiswa dari keluarga kurang mampu,

serta mahasiswa berprestasi di bidang akademik, nonakademik, maupun keagamaan.

Dari total kuota tersebut, sebanyak 1.500 anak yatim menerima beasiswa pendidikan. Bantuan itu diharapkan dapat meringankan beban biaya pendidikan sekaligus meningkatkan semangat belajar para penerima.

Subandi menambahkan, Pemkab Sidoarjo juga akan melibatkan pemerintah desa dalam mendukung pendidikan anak yatim dan keluarga kurang mampu. “Kami



Bupati Subandi saat salurkan beasiswa pendidikan. (Foto: Pemkab Sidoarjo)

akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta turun ke kecamatan agar pemerintah desa ikut peduli,” pungkasnya. (Teddy Syah)

BERITA MINGGUAN INVESTIGASI

BIDIK

NASIONAL

TERBIT SEJAK 1 JUNI 1999

PEMIMPIN UMUM : Pudji Leksono. PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNGJAWAB : Edy Sutanto. PEMIMPIN PERUSAHAAN : Teddy Syah Roni. PENASEHAT HUKUM : Yustinus Haryanto, SH. REDAKTUR PELAKSANA : Budi Santoso. REDAKTUR : A Karim, EM Liswandi, Zaenal Ikhsan, Agus. TIM LIPUTAN KHUSUS : Toddy Pras Hendarto (Koordinator), Suprawoto, Suwoto, Supardi. JAWA TIMUR : SURABAYA : Dymas Ma'rufi Santoso, Abd Rossi, Ninik Rachmawati. SIDOARJO: Nur Yahya. GRESIK : Ariadi AM, Subkan Arif. PAMEKASAN : Ainur Halis. SUMENEP : Adi Yusman, Ishak. SAMPANG : Holillurohman. MOJOKERTO : Husnan. JOMBANG : Totok Agus Hariyanto (Kabiro), Kandiawan, Ahmad Saehu. INDRAMAYU : Candra Shema Restullah (Kabiro), Ragil Pangestu. DEPOK : Harahap (Kabiro), Fajar. BEKASI : Abdul Rachman. KUNINGAN: Edwar Panata Muda. PURWAKARTA: Anthon Pontoh, Endin. BOGOR : Liswandi (Kabiro), Wardiansyah Saputra, Firdaus. JAKARTA/BANTEN : Ayom Cahyono (Kabiro), Dian Wahyudi. BALI : Agung Wiarto. SULAWESI SELATAN : SOPPENG/WAJO : Anwar Paturusi (Kabiro). PINRANG: Moh Sabir (Kabiro), Subhan Hapid. BONE : Edy Suspi AB. JENEPONTO : Aswin R. SULAWESI UTARA : Hilda Pusung. MANADO: Affandi Masloman. KOTAMOBAGU/BMR : Arman Muna (Kabiro), Moh Setio Wanoto. GORONTALO : Rifyl Tama'un. SULAWESI BARAT : Andi Firmansyah. HALMAHERA SELATAN : Anwar Suleman. KALIMANTAN TENGAH : MURUNG RAYA/BARITO UTARA: Effendi (Kabiro). KALIMANTAN BARAT : Sofyan Hadi. KETAPANG : Sukarto. KALIMANTAN UTARA : Syamsudin (Kabiro). KEPRI : BENGKALIS : Agung Mulyono. KOTA BATAM/TANJUNG PINANG/BINTAN: Handoko KEP NATUNA: Amir Hamzah. RIAU: Julianton Andohar Maruba Sinaga (Pelalawan). SUMATERA SELATAN : PALEMBANG : Yanthi Mahameru. LAHAT/MUARA ENIM : Adi Nurahman. PAGAR ALAM : Marleo Tanjung. OKAN KOMERING ULU/OKU SELATAN : M Azhary MY, OKU TIMUR : Nelis Sri Wahyuni. OKI : Nurlis Oktari. SUMATERA UTARA. KOTA MEDAN: Muhammad Syaifei Harahap. LABUHANBATU : M. Sukma (Kabiro). PAKPAK BHARAT : Tennang Tumangger (Kabiro), Dariono. DELI SERDANG : Heri Siswoyo. ASAHAN : Tumin P, Sandro Natanael Hulu, Hengky Arnes, Faoiziduhu Hulu. NIAS UTARA : Hadirat Syukur Harefa. NIAS BARAT : Odaligo Zai. TAPANULI SELATAN : Amir Hamzah Nasution SUMATERA BARAT : PASAMAN: Suryadarma (Kabiro), Refdinal. LAMPUNG : WAY KANAN : Arye M Jahri. LAMPUNG TIMUR : Nuhyin, Mueshin, Antoni. LAMPUNG UTARA : Eka Saputra (Kabiro), Triyutika Sari LAMPUNG SELATAN: Muhammad Fahreza Khbiran Wibowo. LAMPUNG BARAT / PESISIR BARAT : M. Taufik TULANG BAWANG/TULANG BAWANG BARAT : Indra Wijaya, Hendra Jaya. PRINGSEWU : Iskandar. B. BANDAR LAMPUNG : Suhartono Hariwibowo. TANGGAMUS : - NANGROE ACEH DARUSSALAM GAYO LUES : Sutrisno (Kabiro), Simson Sitepu. SUBULUSSALAM : Agus Darminto Bancia (Kabiro), Imran Cibro. ACEH SINGKIL :Roni Syehrani (Kabiro), Nurhalimah. BIREUM : Hendra S. BANGKA BELITUNG: Agusman Sirait (Kabiro), Tamrin. JAMBI, TANJUNG JABUNG BARAT: Joni Efendi. TEBO : Wendri Putra Rezky. NUSA TENGGARA BARAT : MATARAM: Hidayatul Aini (Kabiro). PAPUA : Junjungan Silalahi. LAYOUT/IT Nur Hayati PEMASARAN/ADMINISTRASI/KEUANGAN: Dita Zahra Amalia. PENERBIT : PT Bidik Nasional Pers (BNP). AKTE NOTARIS : LUTFIAFANDI, SH, M.Kn No 19 Tgl 19 Desember 2014. SK MENKUMHAM : No AHU-0003466.AH.01.01 Tgl 26 Januari 2015. AKTE NOTARIS PERUBAHAN : Iwan Saleh Irawan, SH, No 02 Tgl 4 Februari 2020. SK MENKUMHAM PERUBAHAN : No AHU-0010003.AH.01.02. Tahun 2020 NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) BERBASIS RESIKO: 0220105231819. NPWP: 72.007.891.4-617.000. ALAMAT : Jl. Ikan Lele 2 Blok Ci No 14, Perum Bluru Permai, Kel. Bluru Kidul, Kec./Kab. Sidoarjo, Jawa Timur Kode Pos 61233. JAHARTA : Jl. Tentara Pelajar No. 35 RT.01/06 Jakarta 12210, Telp. 021-53661085. BANK: Rek Giro BRI Cabang Sidoarjo No. 0086-01-002254-30-8/ Rek Giro Bank Jatim Cab Sidoarjo No. 0261050731 An PT Bidik Nasional Pers. WEBSITE : https://bidiknasional.com.Percetakan : PT. Aksara Grafika Surabaya, Jl. Brigjen Katamso No. 45 Sidoarjo, Jawa Timur.

Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik Wartawan Bidik Nasional Dilengkapi Kartu Tanda Pengenal, Namanya Tercantum Dalam Box Redaksi, Dilindungi UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik PENGADUAN HOT LINE : 08123209649, 087748103562, 031-99728729. Email: bidiknasional@yahoo.com/ bidiknasional1@gmail.com/bidiknasional2@gmail.com

SEGALA PUBLIKASI YANG DITERBITKAN DI MEDIA INI MERUPAKAN TANGGUNGJAWAB PENANGGUNGJAWAB REDAKSI

Kerjasama Pertamina dan PLN, Ini Langkah Mas Dhito Jaga Pengairan Lahan Petani



menyampaikan, pertanian menjadi salah satu bagian dari program prioritas bupati. Berbagai upaya dilakukan menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Kediri termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Sebagai bentuk antisipasi dampak musim kemarau, Pemerintah Kabupaten Kediri terus menjalin koordinasi dengan Pertamina maupun PLN. Dengan Pertamina ini fokus pada program penyediaan solar subsidi bagi petani, sedang dengan PLN fokus pada penyediaan jaringan listrik untuk program listrik masuk sawah melalui pemasangan sumur submersible.

“Kami dengan Pertamina selalu berkomunikasi dan berkoordinasi, bahwasanya terkait dengan kebutuhan solar ini, kami minta untuk petani diprioritaskan. Dengan PLN juga, terkait program sumur submersible itu karena butuh listrik besar,” katanya usai penyaluran bantuan benih jagung pada 30 Juni 2026.

Untuk memudahkan petani mendapatkan BBM subsidi khususnya solar untuk kebutuhan pertanian, kepengurusan surat rekomendasi diakui Sukadi kini semakin dipercepat. Sebelumnya, petani harus mengurus ke Dispertabun baru mendapatkan barcode untuk pembelian, kini petani cukup dengan melapor ke PPL.

PPL inilah yang akan membantu mengurus rekomendasi ke Dispertabun. Setelah dokumen dinyatakan lengkap termasuk surat keterangan dari pemerintah desa rekomendasi dari Dispertabun diakui akan dikeluarkan pada hari itu juga.

“Rekom dari kami, hari itu juga kita akan kirim ke PPL untuk dicetak dan dikirimkan ke petani. Jadi sehari, mereka sudah bisa mendapatkan barcode solar bersubsidi,” terangnya.

Pun untuk mendapatkan rekomendasi itu semakin mudah, pengawasan tetap dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan penggunaan BBM Subsidi. Adapun penggunaan BBM Bersubsidi itu untuk diesel pompa air maupun untuk operasional Alsintan lain.

Kemudian, untuk membantu pengairan lahan, tahun 2026 ini akan dibangun sumur submersible baik bersumber dari anggaran pemerintah pusat maupun daerah. Tak tanggung-tanggung, bantuan pembangunan akan dilakukan sekitar 380 titik untuk kelompok-kelompok tani yang ada di Kabupaten Kediri.

“Kami dengan PLN Kediri maupun Mojokerto kami selalu berkomunikasi, berkoordinasi terkait kebutuhan petani masalah listrik untuk diprioritaskan,” ucapnya.

Selain langkah-langkah itu, untuk meningkatkan kesejahteraan petani Pemerintah Kabupaten Kediri juga membantu dalam mengurangi biaya produksi dengan pemberian benih. Tahun ini, bantuan benih jagung bahkan disalurkan sebanyak 200 ton yang diperuntukkan untuk luasan lahan 13.300 hektare.

Saat penyaluran secara simbolis bagi kelompok tani pada akhir Juni 2026 lalu, Mas Dhito, sapaan akrab Bupati Kediri menyatakan, tahun ini bantuan Alsintan bagi petani akan kembali disalurkan untuk membantu petani dalam mengolah lahan pertanian.

“Kita tidak berhenti di sini, karena setelah benih kita masih memiliki bantuan nanti Alsintan, jumlahnya nanti ditunggu saja,” kata Mas Dhito. (AdvKominfokabkdr/ND)

Kediri, BN - Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana melakukan berbagai upaya membantu petani mengamankan pengairan lahan pertanian. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi musim kemarau panjang yang bisa mengancam produktivitas pertanian.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Dispertabun) Kabupaten Kediri Sukadi

Pemerintah Kenalkan Potensi Pariwisata Bumi Panjalu Melalui Event Kediri Berseli 2026



KEDIRI, BN - Pemerintah Kabupaten Kediri mewadahi pecinta sepeda lipat sekaligus mengenalkan potensi pariwisata Bumi Panjalu melalui event Kediri Berseli 2026.

Kegiatan yang diadakan pada Sabtu (4/7) ini diikuti sekitar 550 peserta dari berbagai penjuru daerah di Indonesia. Tidak hanya dari Kediri maupun kota sekitar, peserta juga datang dari Batam, Palangkaraya, Samarinda, Bali, Jakarta, Surabaya, dan sejumlah kota lainnya.

Dalam event ini, para peserta menempuh rute sejauh kurang lebih 47 kilometer. Start dimulai dari Taman Hijau SLG dengan checkpoint pertama di Wisata Ubalan dan checkpoint kedua di Museum Kabupaten Kediri.

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana melalui Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Mustika Prayitno Adi mengatakan, kehadiran peserta dari berbagai penjuru tanah air ini menjadi kesempatan untuk mengenalkan potensi wisata Kabupaten Kediri secara lebih luas.

Menurutnya, sektor pariwisata Kabupaten Kediri juga didukung beragam kuliner khas bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan saat berkunjung.

“Sektor pariwisata Kabupaten Kediri didukung oleh beragam kuliner khas yang dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan ketika berkunjung maupun saat kembali ke daerah asal mereka,” katanya.

Mustika berharap event Kediri Berseli dapat memberi dampak bagi sektor pariwisata sekaligus menggerakkan ekonomi warga melalui UMKM.

Sementara itu, Ketua Panitia Kediri Berseli 2026 Andy mengatakan Kabupaten Kediri dipilih sebagai lokasi kegiatan karena memiliki destinasi wisata dan kekayaan kuliner yang dinilai menarik untuk dikenalkan kepada peserta.

Andy menambahkan, pihaknya berencana kembali menggelar jambore sepeda lipat di Kabupaten Kediri pada 2028 dengan target peserta hingga ribuan orang dari tingkat nasional sampai Asia.

“Pada tahun 2028 mendatang kami juga berencana mengadakan jambore sepeda lipat di Kabupaten Kediri dengan peserta yang ditargetkan mencapai ribuan hingga tingkat Asia,” tambahnya. (AdvKominfokabkdr/ND)

IPWL LRPPN-BI dan LSM KOBRA Banyuwangi Komitmen Berantas Narkoba



Pengurus IPWL LRPPN-BI Banyuwangi bersama DPC LSM KOBRA Banyuwangi. (ist)

BANYUWANGI, BN -Institusi Penerima Wajib Lapor Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (IPWL LRPPN-BI) Banyuwangi bersama DPC LSM KOBRA Banyuwangi mempertegas komitmen mereka dalam menjalin sinergitas dan kemitraan. Fokus utama kolaborasi ini mencakup kegiatan sosial, kesehatan, serta aksi kemanusiaan di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Ketua IPWL LRPPN-BI Banyuwangi, M. Hiksan, menyampaikan

bahwa pihaknya bersama jajaran pengurus tetap teguh menjalankan visi dan misi organisasi, terutama dalam penanganan masalah narkoba.

“Kami fokus pada kegiatan pencegahan dan rehabilitasi bagi para residen. Selain itu,

edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba terus kami gencarkan ke berbagai lapisan, mulai dari murid sekolah, mahasiswa, hingga pemangku kepentingan (stakeholder) terkait,” ujar Hiksan, Jumat (6/2/2026).

Ia juga menambahkan bahwa langkah ini didukung dengan koordinasi intensif bersama Satreskoba Polresta Banyuwangi, instansi kesehatan, dan BNNK Banyuwangi guna memastikan program berjalan efektif.

Senada dengan hal tersebut, Ketua DPC LSM KOBRA Banyu-

wangi, Daud Djoni, WD, mengapresiasi kemitraan yang telah terbangun selama ini. Menurutnya, kolaborasi antar lembaga sangat strategis untuk menjaga kondusivitas daerah.

“Selama ini kita membangun sinergi dalam hal kegiatan sosial dan kemanusiaan. Kami juga aktif berkoordinasi dengan Polresta Banyuwangi terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas),” terang Djoni kepada awak media Bidik Nasional.

Dalam pernyataan tegasnya, Djoni menekankan bahwa LSM KOBRA dan LRPPN-BI sepakat untuk berdiri di garis depan dalam pemberantasan peredaran narkoba. Ia mengingatkan generasi muda untuk menjauhi barang haram tersebut karena dampak fatal yang ditimbulkan.

“Narkoba dapat merusak saraf organ tubuh dan berujung pada kematian. Marilah kita sayang anak, istri, dan keluarga kita. Jauhi penyalahgunaan narkoba dan tetaplah waspada,” tegasnya menutup wawancara. (Srp/Sgg)

Peringati HANI 2026, Wabup Banyuwangi Ajak Semua Elemen Antisipasi Peredaran Narkoba



Wabup Banyuwangi Ir. Mujiono, M.Si (kiri). (Dj)

Wakil Bupati Banyuwangi, Ir. Mujiono, M.Si, menegaskan bahwa dampak penyalahgunaan narkoba sangat merusak jiwa dan pikiran. Jika tidak dikontrol, hal ini dapat memicu tindakan kriminal yang melanggar hukum di Indonesia. Oleh karena itu, pencegahan sedini mungkin menjadi hal yang wajib dilakukan.

“Ayo kita bersama-sama menjaga situasi kondisi wilayah Banyuwangi, dijauhkan dari kekerasan, narkoba, bullying, dan sebagainya,” ujar Mujiono saat memberikan keterangan kepada bidiknasional.com, Rabu (8/7/2026).

Untuk memaksimalkan pencegahan, Pemkab Banyuwangi telah berkoordinasi dengan instansi vertikal Forkopimda. Sinergi ini melibatkan Polresta Banyuwangi, BNNK Banyuwangi, TNI AL Lanal Banyuwangi, serta TNI AD Kodim 0825 Banyuwangi guna memutus rantai peredaran yang semakin marak.

Selain aparat penegak hukum, Pemkab juga merangkul tokoh agama, tokoh masyarakat, dan ulama.

Mujiono meminta seluruh elemen berperan aktif meningkatkan spiritualitas generasi muda mulai dari tingkat SD, SMP, SMA/SMK, hingga Perguruan Tinggi.

“Melalui prinsip gotong royong atau tandang bareng, diharapkan peredaran narkoba di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dapat ditekan secara maksimal demi menciptakan lingkungan hidup yang aman, nyaman, dan berkah,” pungkasnya. (Dj)

BANYUWANGI, BN -Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperketat kewaspadaan terhadap maraknya peredaran gelap narkoba. Imbauan tersebut disampaikan dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2026.

Wakil Bupati Banyuwangi, Ir. Mujiono, M.Si, menegaskan bahwa dampak penyalahgunaan narkoba sangat merusak jiwa dan pikiran. Jika tidak dikontrol, hal ini dapat memicu tindakan kriminal yang melanggar hukum di Indonesia. Oleh karena itu, pencegahan sedini mungkin menjadi hal yang wajib dilakukan.

HANI 2026, Panti Rehabilitasi Narkoba IPWL LRPPN-BI Banyuwangi Gelar Donor Darah

BANYUWANGI, BN - Dalam memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI), Panti Rehabilitasi Narkoba IPWL LRPPN Bhayangkara Indonesia Banyuwangi menggelar kegiatan sosial donor darah sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama.

Kegiatan ini diikuti oleh para Pembina, staf, relawan, serta warga binaan rehabilitasi yang telah dinyatakan pulih. Aksi kemanusiaan tersebut berlangsung di Aula utama BNNK Banyuwangi dengan menggandeng Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Banyuwangi, pada Hari Minggu (6/7/2026).

Kegiatan donor darah ini menjadi wujud nyata semangat “Jenggirat Tangi”, yang berarti bangkit dan bergerak bersama untuk kebaikan. Melalui semangat tersebut, IPWL LRPPN Bhayangkara Indonesia Banyuwangi menunjukkan komitmennya dalam menjalankan Visi dan Misi membantu masyarakat serta mendukung Pemerintah daerah mewujudkan Banyuwangi yang bersih dari penyalahgunaan narkoba. Selain fokus pada rehabilitasi, Lembaga ini juga aktif dalam kegiatan sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat luas.

Ketua IPWL LRPPN Bhayangkara Indonesia Kabupaten Banyuwangi Mohammad.Hiksan, S.Pd. menjelaskan, kegiatan donor darah ini bukan hanya sekadar aksi sosial, tetapi juga simbol kebangkitan dan kepedulian. Menurutnya, mantan penyalahguna narkoba yang kini telah pulih memiliki semangat baru untuk berkontribusi positif bagi masyarakat. Dengan mendonorkan darah, mereka turut menyelamatkan nyawa orang lain dan membuktikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk berubah dan berbuat baik” jelasnya.

Antusiasme peserta terlihat sejak pagi hari. Para relawan dan warga binaan dengan tertib mengikuti proses pemeriksaan kesehatan sebelum mendonorkan darah. PMI Banyuwangi mencatat puluhan kantong darah berhasil dikumpulkan dalam kegiatan tersebut. Darah yang terkumpul akan disalurkan kepada rumah sakit dan pasien yang membutuhkan di wilayah Banyuwangi dan sekitarnya.

Selain donor darah, kegiatan ini juga diisi dengan penyuluhan singkat mengenai bahaya narkoba dan pentingnya menjaga kesehatan fisik tubuh serta mental. Para peserta diajak

untuk terus menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas, dan kepedulian sosial. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin sadar bahwa perang melawan narkoba tidak hanya dilakukan dengan penegakan hukum, tetapi juga dengan membangun kepedulian dan kebersamaan.

Dengan terselenggaranya kegiatan donor darah ini, IPWL LRPPN Bhayangkara Indonesia Banyuwangi menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba.

Semangat “Jenggirat Tangi” menjadi penggerak utama dalam setiap langkah lembaga ini untuk terus berkontribusi bagi kemanusiaan dan mewujudkan Banyuwangi yang sehat, bersih, dan bebas dari narkoba. (Dj/Tfk)



Kegiatan sosial donor darah Panti Rehabilitasi Narkoba IPWL LRPPN Bhayangkara Indonesia Banyuwangi. (ist)

Dugaan Pungli di SMKN 1 Ngasem Mengandung Unsur Paksaan dan Pemerasan ke Siswa



Ilustrasi

KEDIRI, BN - Beredar percakapan dugaan intimidasi yang dilakukan oknum Guru dan Petugas TU kepada siswa di SMKN 1 Ngasem. Isinya, bilamana siswa tidak mencicil Sumbangan Partisipasi Masyarakat (SPM) akun ujian tidak bisa dibuka. Ini merupakan sebuah bentuk paksaan dan pemerasan yang dilakukan pihak sekolah terhadap siswa.

Sangat disayangkan, apa yang dilakukan oleh oknum Guru Kelas dan TU pihak SMKN 1 Ngasem, meskipun dengan dalih kesepakatan sumbangan partisipasi masyarakat menjadi sebuah pemaksaan dan pemerasan terhadap walimurid bilamana tidak mencicil dan melunasi siswa tidak dapat mengikuti ujian karena akun akan di kunci dan tidak bisa di buka, meskipun dalam perdebatannya akhirnya akun dibuka dan siswa diperbolehkan mengikuti ujian, akan tetapi psikologis anak terganggu dalam melaksanakan ujian.

Keterangan yang dihimpun bidiknasional.com (bn.com), yang menjadi pertanyaan wali murid..?,

“Ini sumbangan yang mengelola komite sekolah apa pihak sekolah sendiri, karena yang menagih bukan komite akan tetapi pihak dari sekolah yaitu guru wali kelas dan TU dengan nada yang kurang pas menurut saya, anak saya dipanggil dan ditagih akan kekurangan SPM,” ungkap Wali murid.

Terkait hal ini pengamat pendidikan dan pengacara muda Ikbal Sermaf, S.H. yang juga sedang menempuh semester akhir S2 ilmu Hukum di Uniska Kediri memberikan tanggapan pandangan terkait hukum bilamana ada indikasi pemerasan dan pungli.

Ikbal mengatakan tindakan oknum sekolah yang menahan kartu ujian atau mengunci akun ujian siswa dengan dalih belum melunasi “sumbangan” dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum. Secara yuridis, unsur paksaan dan ancaman tersebut memenuhi delik pidana pemerasan serta pungutan liar.

Berikut adalah pasal-pasal pidana yang dapat menjerat para pelaku:

- 1. Pasal Pemerasan (KUHP)
- Jika dugaan intimidasi

dan penguncian akun ujian tersebut terbukti dilakukan untuk memaksa siswa/orang tua membayar sejumlah uang, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP lama (atau Pasal 482 UU No. 1/2023 tentang KUHP baru) terkait pemerasan: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu... diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

- 2. Tindak Pidana Korupsi / Pungli (UU Tipikor)

Bagi oknum pihak sekolah yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri, tindakan memungut biaya tidak sah dengan cara memaksa dapat dijerat dengan Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Ancaman Pidana: Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda minimal Rp200 juta hingga Rp1 miliar.

Selain hukum pidana, lanjut Ikbal tindakan penarikan uang berkedok sumbangan wajib ini secara tegas melanggar regulasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek):

Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah: Menegaskan bahwa Komite Sekolah hanya boleh melakukan penggalangan dana berupa sumbangan sukarela, bukan pungutan yang ditentukan jumlah dan tenggat waktunya, apalagi bersifat mengikat.

Permendikbud No. 44 Tahun 2012: Melarang segala bentuk pungutan yang dikaitkan dengan persyaratan akademik, termasuk hak siswa untuk mengikuti ujian atau menerima hasil evaluasi belajar, pungkas Ikbal.

Hingga berita ini diturunkan, pihak SMKN 1 Ngasem maupun Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kediri belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan intimidasi dan penguncian akun ujian siswa tersebut. Meskipun siswa tersebut akhirnya di perbolehkan mengikuti ujian setelah ditagih terkait sumbangan. Kasus ini diharapkan segera mendapat perhatian dari Satgas Saber Pungli demi menjamin hak belajar para siswa. (ND)

Skala Prioritaskan Attitude, Bangun Potensi Individu dan Kerja Kelompok SMAN I Kedamean Gresik

GRESIK, BN - Menyimpulkan sementara hasil interaktif bersama Humas (Hubungan Masyarakat) Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kedamean, Kabupaten Gresik.

Abah Tri, panggitan akrabnya di tengah kegiatan workshop awal tahun pelajaran baru dengan tema penguatan dan peningkatan kapasitas guru, beliau Tri Bagus, S.Pd meluangkan waktu demi menemui awak media Cetak & Online Bidik Nasional, awal Juli/2026.

Melalui methodology Project Based Learning (PjBL) & STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), sebagaimana telah diuraikan singkat oleh Humas, dan yang sekaligus menjadi harapan dari seluruh elemen dan/atau pihak lembaga pendidikan sekolah SMA Negeri 1 Kedamean ialah mempersiapkan peserta didik setelah lulus.

SMA Negeri 1 Kedamean Gresik, berjumlah tidak lebih kurang dari 1070 siswa-siswi, dengan ruang belajar mengajar berjumlah 30 ruang yang berukuran sesuai standar, didukung luas area dan kenyamanan suasana, tentu menjadi besar harapannya adalah kepercayaan dari para wali siswa-siswi.

PjBL, sarana dalam membangun potensi skill dan kreativitas siswa-siswi dalam rangka berproyeksi. Diawali dari pembibitan, pemrosesan hingga sampai pada tahap marketingisasi produk, kegiatan belajar yang melibatkan seluruh kelas, menurut Tri Bagus, S.Pd, kelak akan menjadi besar guna dalam berliterasi bagi siswa-siswi saat melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih lanjut, tuturnya.



Gresik, jika pada tahun sebelumnya hanya satu jurusan saja.

Bagaimana dengan nurani personal dari pada seseorang Tri Bagus, S.Pd, sesaat setelah disinggung oleh awak media tentang skala prioritas program dan/atau kinerja bagi para penyelenggara pendidikan. Tegas dan sangat jelas bahwa pembekalan attitude bagi siswa-siswi yang telah lulus akan membuka luas peluang apapun nantinya, tekan Abah Tri.

Tetap dalam koridor dan silabus dari kementerian, bahwa dengan diawali membaca ayat-ayat suci sebelum masuk dan menerima pelajaran umum di ruang atau pada kelas sekolah, serta senantiasa sholat berjamaah dalam waktunya, menjadi keyakinan yang mantap bagi Tri Bagus, S.Pd selaku Humas, bahwa attitude siswa-siswi SMA Negeri 1 Kedamean sangatlah terjamin. (SUB)

Pilkades Sumenep Munggu Juklak -Juknis dari Kementrian RI

SUMENEP, BN - Pelaksana Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak pada Tahun 2027 di Kabupaten Sumenep masih menunggu petunjuk dari Pemerintah Pusat, yaitu dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) sampai ini juga belum memberikan perintah kepada kepala Daerah tingkat II mengenai regulasi.

Dari jumlah sebanyak 246 Desa dari 27 kecamatan lingkungan Daerah Sumenep rencana akan adakan pemilihan kepala desa serentak kalau tidak perubahan dari aturan Pemerintah Pusat.

Sedangkan jumlah yang harus melakukan Pilkades



untuk daratan sekitar 186 Desa dari jumlah kecamatan yang ada di Sumenep dan 60 Desa dilaksanakan di kepulauan dari jumlah kecamatan yang ada.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep Achmad mengatakan bahwa pelaksanaan menetapkan pilkades untuk Kabupaten pulau dan daratan masih menunggu aturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan selanjutnya jika sudah diterbitkan aturannya dari pusat dan turun ke Kabupaten sumenep maka DPMD akan menyusun draf peraturan bupati

■ Bersambung ke hal.11 kol.5

Mashudi, Ketua K3S Kecamatan Bungah Gresik Prioritaskan Saprass Sekolah



Mashudi Ketua K3S Kecamatan Bungah Gresik. (sub)

GRESIK, BN - Suasana hari libur panjang usai pelaksanaan ujian sekolah tampak terasa, khususnya di lembaga pendidikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Dasar (SD) Negeri 247 Melirang, kecamatan Bungah, akhir Juni Th. 2026. Bersama tenaga pendidik yang sangat senior dapat dibilang demikian,

sebab hingga di penghujung masa tugasnya, Mashudi, S.Pd dipercaya menjabat sebagai Kepala Sekolah (Kasek) di UPT SD NEGERI 247 terletak di Desa Melirang kecamatan Bungah kabupaten Gresik, Jatim.

Mashudi, S.Pd juga menjabat sebagai ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) se-Kecamatan Bungah selama lebih kurang dari 3 periode, menjadi entitas atau bukti dedikasi dan kredibilitasnya.

Ditemui di ruang kerjanya, disela mengerjakan tugas-tugasnya, Mashudi, S.Pd menyempatkan berbincang atau berdialog dengan awak media Cetak & Online Bidik Nasional mengangkat tema seputar fokus kinerja dan/atau konsentrasi tugas yang harus dia prioritaskan dalam waktu dekat ini.

Senantiasa disiplin dan tanggung jawab kinerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di wilayah daerah kabupaten Gresik sebagai tenaga fungsional, tuturnya, walaupun ditengah hari libur sekolah, tegasnya, seraya dengan tetap mengingatkan para guru atau seluruh karyawan sekolah agar tepat waktu setiap masuk dan pulang kerja.

Program kerja kategori skala prioritas Dinas Pendidikan (Dispendik) Gresik tentang pembangunan Sarana dan Prasarana (Saprass), adalah menjadi fokus perhatian dari pada Mashudi, S.Pd bahwa dalam realisasinya akan dilaksanakan tahun ini, ingatnya, selaku ketua K3S.

Jika sesuai agenda dan/atau menurut rencana yang sudah dijadwalkan bahwa ada beberapa titik pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah kecamatan Bungah, yaitu diantaranya adalah pengurukan/ peninggian lantai sekolah yang terdapat dua lembaga sekolah yakni UPT SD Negeri 244 Kemangi dan UPT SDN 254 Sukowati Bungah, ungkap Mashudi, S.Pd.

Begitu pula lembaga pendidikan yang beliau pimpin sendiri, yakni UPT SD Negeri 247 Melirang, dalam pengamatan awak media ialah Saprass sekolah yang tampak jelas dari depan gedung yaitu sebuah ruangan toilet atau kamar mandi yang tidak layak terlihat. (SUB)

Pemkab Pamekasan Gelar Pemilihan Kacong Chebbing & Duta Batik Daerah



Grand final pemilihan Kacong Chebbing dan putra-putri batik daerah kabupaten Pamekasan. (ist)

PAMEKASAN, BN - Pemerintah kabuptaen Pamekasan melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) menggelar event grand final pemilihan kacong chebbing dan putra-putri batik daerah yang dilaksanakan di lapangan Nagara Bhakti Pendopo Agung Ronggosukowati Pamekasan, Sabtu (11/7/2026).

Kegiatan itu diikuti 10 pasang finalis kacong chebbing dan 10 pasang finalis putra-putri batik se-kabupaten Pamekasan tersebut berlangsung sangat meriah.

Dalam kesempatan itu, kepala Disporapar Pamekasan Akmalul Firdaus menyampaikan kegiatan itu didorong oleh besarnya potensi pariwisata, budaya ekonomi kreatif serta warisan batik yang menjadi identitas kabupaten Pamekasan, sehingga potensi itu perlu dilestarikan dan dijaga serta diperkenalkan ke berbagai daerah di Indonesia hingga ke manca negara. “Kita memerlukan keterlibatan generasi muda yang mampu menjadi representasi daerah. baik dalam bidang promosi, pelestarian budaya maupun pengembangan ekonomi kreatif,” ungkapnya.

Firdaus juga menjelaskan penyatuan dua agenda kegiatan yang disatukan dalam satu kegiatan itu merupakan implementasi prinsip efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan. Sedangkan kegiatan itu bertujuan untuk menjangkit pemuda yang memiliki karakter, wawasan, integritas, kemampuan komunikasi dan kepedulian terhadap pembangunan daerah serta menumbuhkan rasa cinta, kebanggaan dan bertanggung jawab terhadap daerah. selain itu juga untuk melahirkan duta yang mampu mempromosikan pariwisata, budaya, ekonomi kreatif dan batik Pamekasan. “Kegiatan ini untuk mendorong keterlibatan generasi muda dalam promosi daerah. baik di tingkat regional maupun nasional,” pungkasnya.

Sementara menurut bupati Pamekasan Dr Kholilurrahman, SH, M.Si mengatakan kegiatan pemilihan kacong chebbing dan putra-putri batik merupakan agenda tahunan yang sempat tidak diselenggarakan dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten pamekasan berkomitmen menghidupkan kembali agenda tersebut dan mengembangkannya menjadi lebih berkualitas setiap tahun. sedangkan para finalis yang tampil merupakan generasi muda terbaik yang telah melalui proses seleksi dan pembinaan. pihaknya meminta masyarakat memandang kegiatan itu sebagai upaya membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. “Saya berharap kegiatan ini mampu mengarahkan generasi muda pada aktifitas positif dan mengembangkan potensi kepemimpinan, meningkatkan rasa percaya diri serta memperkuat kepedulian terhadap pembangunan daerah,” ujarnya. (kholis)

**Keluarga Besar
Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja
KABUPATEN PAMEKASAN
Mengucapkan
Selamat Hari Koperasi Nasional
Yang Ke- 79 Tahun 2026**

“Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya”

Mohammad Alwi, S.Sos, M.Si

**Plt Kadis Koperasi UKM dan
Tenaga Kerja**



Aktivist Antikorupsi Soroti Proyek Pelebaran Jalan Salak Desa Silirejo Tirto



PEKALONGAN, BN – Aktivis antikorupsi, Agus Tiarso, mengkritisi pelaksanaan proyek pelebaran Jalan Salak di Desa Silirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Kritik tersebut disampaikan setelah ia menemukan proyek yang sedang berlangsung diduga kurangnya pengawasan dari dinas terkait.

Menurut Agus, spesifikasi pekerjaan seperti panjang, lebar, dan teru-

Proyek pelebaran Jalan Salak di Desa Silirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. (dikin)

ketebalan harus diawasi dengan ketat. “Sudah beberapa hari saya memantau pekerjaan proyek pelebaran jalan ini. Namun hingga saat ini tidak terlihat konsultan pengawas dilokasi,” ujar Agus, Jumat (3/7/2026).

Selain menyoroti mininya transparansi, Agus juga mengaku menemukan sejumlah hal yang menurutnya perlu menjadi perhatian. Salah satunya adalah proses penggalian yang dilakukan tanpa menggunakan alat berat serta dugaan ke-

lai kurang sesuai. “Saya melihat proses penggalian dilakukan tanpa alat berat. Dari hasil pengamatan saya, kedalaman galian juga patut diduga belum memenuhi ketentuan. Hal ini tentu perlu mendapat perhatian agar kualitas pekerjaan tidak dikorbankan dan cepat rusak,” katanya.

Agus mengaku sempat berdialog dengan salah seorang pekerja di lokasi proyek. Namun, saat ditanya mengenai siapa pelaksana pekerjaan, pekerja tersebut mengaku tidak mengetahui. Bahkan, menurut Agus, pekerja juga tidak mengetahui keberadaan papan informasi proyek sejak pekerjaan dimulai.

“Saya sempat bertanya kepada salah satu pekerja di lokasi mengenai siapa pelaksana pekerjaan, tetapi jawabannya tidak tahu. Bahkan sejak awal, mereka juga tidak mengetahui adanya papan kegiatan proyek,” ungkapnya.

Atas temuan tersebut, Agus meminta instansi

terkait segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek. Ia juga mempertanyakan fungsi pengawasan dari dinas teknis maupun konsultan pengawas agar pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, ia berharap penyedia jasa konstruksi lebih mengedepankan prinsip transparansi dalam setiap pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran negara.

“Karena proyek ini dibiayai oleh uang rakyat, maka pelaksanaannya harus dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan sesuai aturan. Transparansi merupakan hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana anggaran negara digunakan,” tegas Agus.

Hingga berita ini ditulis, pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai kritik dan temuan yang disampaikan Agus Tiarso. (dikin)

SLB Hikmah Mandiri Desa Hariang Dapat Kucuran Dana Rp1,4 M



Gedung SLB Hikmah Mandiri Desa Hariang terlihat direnovasi. (Ernawan)

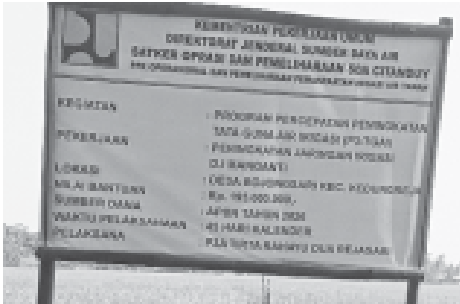
SUMEDANG, BN – SLB Hikmah Mandiri, beralamat di Jl.Hariang RT.01/RW.01 Desa Hariang, Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, tahun 2026 ini telah mendapat bantuan Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dianggarkan sebesar Rp1.472.169.200,-. Pekerjaan ini dikerjakan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (PPSP).

Saat ditemui media, bendahara. Rinzie Rapsodia, S.Pd mewakili Kepala Sekolah Seli Herdina dan Ketua Yayasan Moch Billy mengatakan, “Alhamdulillah pihak pemerintah telah mengucurkan program ini mudah mudahan bermanfaat bagi masyarakat Desa Hariang terutama dan Buahdua pada umumnya,” kata Rinzie

Pekerjaan ini dikerjakan selama 150 Hari kalender. Rinzie berharap bahwa program ini adalah program yang sangat baik menurut kami dan mudah mudahan dapat diselesaikan tepat waktu, lancar dan tidak ada hambatan tegasnya.

Aparatur Pemerintahan Desa Hariang saat dikonfirmasi mengatakan, “Kami setuju sekali dengan adanya bantuan pemerintah untuk mengembangkan pendidikan di tingkat Sekolah Luar Biasa yang ada di areal Lingkungan Desa kami sehingga pengadaan sarana yang telah diperhatikan sekali mudah mudahan SLB Hikmah Nandiri bisa lebih maju,” tuturnya. (Ernawan)

Warga Desa Bojongsari Sambut Baik Pembangunan Saluran Irigasi Tersier P3-TGAI



CILACAP, BN – Warga Dusun Rejasari, Desa Bojongsari, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, menyambut antusias pelaksanaan pembangunan saluran irigasi tersier melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026.

Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Kelompok Tani P3-TGAI Tirta Rahayu Dua yang diketuai oleh Riyanto. Saat ini

pembangunan masih berlangsung dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat.

Ketua Kelompok Tani, Riyanto, mengatakan program P3-TGAI menjadi harapan bagi para petani karena saluran irigasi yang lebih baik akan membantu memperlancar distribusi air ke areal persawahan. Dengan demikian, produktivitas pertanian diharapkan meningkat dan kebutuhan air saat musim tanam dapat terpenuhi secara lebih optimal.

Antusiasme masyarakat terlihat dari keterlibatan warga dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan. Mereka berharap pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu dengan kualitas yang baik sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Mewakili kelompok tani dan masyarakat, Riyanto menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy, khususnya PPK Anang, atas dukungan pemerintah melalui Program P3-TGAI yang dinilai sangat membantu para petani dalam meningkatkan infrastruktur irigasi di wilayahnya.

Para petani berharap program pembangunan irigasi seperti ini dapat terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang agar jaringan irigasi di wilayah pertanian semakin baik. Mereka meyakini ketersediaan air yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian dan mendukung ketahanan pangan nasional.

(Asep sujana)

Klarifikasi RS Permata Kuningan: IPAL Tidak Jebol, Aliran Air Berasal dari Saluran Drainase Hujan



Rumah Sakit Permata Kuningan. (ist)

KUNINGAN, BN – Manajemen Rumah Sakit Permata Kuningan memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang menyebutkan adanya dugaan jebolnya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) rumah sakit. Pihak rumah sakit menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Direktur RS Permata Kuningan menjelaskan bahwa aliran air yang terlihat di sekitar area rumah sakit bukan berasal dari sistem IPAL, melainkan dari saluran drainase yang menampung limpasan air hujan. Menurutnya, instalasi pengolahan air limbah rumah sakit tetap beroperasi secara normal dan tidak mengalami kerusakan maupun kebocoran.

Pihak rumah sakit menyampaikan bahwa pengelolaan limbah medis dan limbah cair dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasional yang berlaku serta berada di bawah pengawasan instansi yang berwenang. “Kami menghormati perhatian masyarakat terhadap persoalan lingkungan. Namun kami juga berharap informasi yang beredar dapat dikonfirmasi berdasarkan fakta dan hasil pemeriksaan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” ujar perwakilan manajemen.

Menurut pihak rumah sakit, langkah tersebut justru diharapkan dapat memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai kondisi IPAL dan memastikan seluruh proses pengelolaan limbah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

RS Permata Kuningan juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi serta mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga terdapat hasil pemeriksaan resmi dari instansi yang berwenang. Dengan adanya klarifikasi ini, manajemen berharap seluruh pihak dapat menunggu hasil pemeriksaan secara objektif sehingga setiap informasi yang berkembang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan data dan fakta, bukan semata-mata dugaan. (Ed)

Dampak Proyek Konstruksi, LSM Lentera Audiensi dengan BBWS Citanduy

BANJAR, BN – Rabu 8 Juli 2026, sebanyak delapan orang pengurus dan anggota LSM Lentera menggelar audiensi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy untuk menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat terkait dampak pelaksanaan proyek jasa konstruksi. Audiensi diterima oleh Humas BBWS Citanduy Rahmat dan Yana selaku Pengawas Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA).



Pengurus LSM Lentera saat Audiensi dengan BBWS Citanduy. (asep)

Menanggapi aspirasi tersebut, Rahmat, Humas BBWS Citanduy, menjelaskan bahwa pihaknya telah beberapa kali melayangkan surat kepada kontraktor terkait penanganan kerusakan jalan. Namun hingga saat ini, menurut

Rahmat, belum ada tanggapan dari pihak kontraktor.

Sementara itu, Yana, Pengawas Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA), menjelaskan bahwa persoalan akses jalan di wilayah Karyamukti telah dikomunikasikan sejak pekerjaan Lakbok Utara tahun 2022 dengan pihak pelaksana pekerjaan.

Terkait belum optimalnya pelayanan irigasi Bendung Bantar Helang, Yana menjelaskan masih terdapat kendala lahan milik warga sehingga sebagian aliran air masih dialihkan ke saluran pembuang dan belum dapat mengairi seluruh lahan persawahan secara maksimal.

(ASEP SUJANA)

Perkuat Sinergitas Penegakan Hukum, Kapolres dan Kajari Wonogiri Bahas Penguatan Koordinasi

WONOGIRI, BN – Komitmen memperkuat penegakan hukum di Kabupaten Wonogiri kembali ditegaskan melalui pertemuan antara Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Wonogiri, Herry Somantri, S.H., M.H., dengan Kapolres Wonogiri, AKBP Wahyu Sulisty, S.H., S.I.K., M.P.M., yang berlangsung pada Selasa (14/7/2026).

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban tersebut menjadi momentum strategis untuk mempererat sinergi serta meningkatkan koordinasi antara Kejaksaan Negeri Wonogiri dan Polres Wonogiri sebagai sesama aparat penegak hukum.

Dalam pertemuan itu, kedua pimpinan membahas berbagai upaya untuk memperkuat koordinasi dalam penanganan perkara pidana, sekaligus menyamakan langkah dalam mewujudkan sistem penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Selain itu, pembahasan juga menitikberatkan pada pentingnya langkah-langkah pencegahan tindak pidana guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Wonogiri.

Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulisty mengatakan bahwa hubungan yang harmonis dan komunikasi yang



Kajari Wonogiri, Herry Somantri, S.H., M.H., dengan Kapolres Wonogiri, AKBP Wahyu Sulisty, S.H., S.I.K., M.P.M. (ist)

aman dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Kabupaten Wonogiri,” ujar AKBP Wahyu Sulisty.

Sementara itu, pertemuan tersebut juga menjadi wujud komitmen kedua institusi untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan penegakan hukum yang semakin kompleks. Melalui koordinasi yang berkesinambungan, Polres Wonogiri dan Kejaksaan Negeri Wonogiri optimistik dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga kondusivitas wilayahnya.

Dengan terjalinnya sinergi yang semakin solid antara kepolisian dan kejaksaan, diharapkan proses penegakan hukum di Kabupaten Wonogiri dapat berjalan lebih efektif, profesional, dan memberikan manfaat nyata bagi terciptanya keamanan, ketertiban, serta kepastian hukum di tengah masyarakat.

(* hery/ sumber : Humas Polres Wonogiri Polda Jateng

Revitalisasi Ruang Kelas SMAN Tomo Digelontor APBN 2 M

SUMEDANG, BN - Beberapa titik pekerjaan yang dikerjakan di Sekolah Menengah Atas Negeri Tomo diantaranya, pekerjaan rehab 4 Ruang kelas, 3 Ruang Administrasi (Ruang Guru), Ruang Kepala Sekolah, Ruang Tata Usaha, Pembangunan 3 Ruang kelas baru, Rehabilitasi Ruang BK (Bimbingan Konseling), Rehabilitasi 1 Ruang Toilet. Pekerjaan dikerjakan selama 180 Hari kalender terhitung mulai Tanggal 23 Juni 2026.

Pekerjaan ini menurut penjelasan Ketua

Panitia Pelaksana Satuan Pendidikan mengatakan bahwa Pekerjaan ini dianggarkan dari dana APBN melalui Program Revitalisasi Sekolah Menengah Atas. Anggaran yang terkucur semuanya untuk pekerjaan tersebut mencapai Rp2.000.464.000,-.

Saat dikonfirmasi Jafarsidik, ST selaku Ketua P2 SP dihadapan Kepala Sekolah Dadan Sundana, S.Pd.M.Pd dan pelaksana lapangan H.Sukmadilaga Edi menjelaskan bahwa Pekerjaan ini adalah pekerjaan Program Revita-

lisasi satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, “Kami bekerja bersama sama Tim P2 SP yang bertanggung jawab penuh serta mengacu kepada Juklak dan Juknis yang ada,” ujarnya.

Jafarsidik yang didampingi oleh Consultant Perencana dan Pengawas mengatakan, tanpa persatuan dan kesatuan semua pihak pembangunan tak akan terwujud, “Salah satu harapan kami mudah mudahan pekerjaan bisa lancar tidak ada hambatan sampai pinishing pekerjaan nanti,” tutupnya. (Ernawan)



SMAN Negeri Tomo terlihat direhab. (Ernawan)

BLK Kediri Gelar Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Plate Welder FCAW 3G-UP/PF Tahun 2026



Para peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Plate Welder FCAW 3G-UP/PF Tahun 2026 bersama instruktur dari IPT BLK Kediri. (pa)

KEDIRI, BN - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur melalui Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja (BLK) Kediri menggelar pelatihan Plate Welder FCAW 3G berlangsung di kantor BLK Kediri Jalan Pare-Wates KM 1,5 Desa Gedangsewu, Kec.Pare Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Selasa (7/7/2026). Pelatihan Welder kali ini diikuti 16 peserta yang dimulai 9 Juni 2026 hingga 8 Agustus 2026 sekitar 340 Jam Pelajaran.

Pelatihan Plate Welder FCAW 3G-UP/PF adalah program kejuruan teknik las yang fokus melatih peserta menguasai pengelasan plat baja menggunakan metode Flux Cored Arc Welding (FCAW) pada posisi vertikal naik (3G-UP atau PF) hingga mencapai kualifikasi kompetensi standar industri dan BNSP.

Pelatihan ini bertujuan mencetak juru las profesional yang terstandarisasi. Lulusan diharapkan mampu menguasai pemahaman keselamatan dan kesehatan kerja (K3) area pengelasan.

Persiapan material dan penyetelan mesin las FCAW. Teknik root pass, filling, dan capping pada posisi vertikal.

Yannuar Syahbani selaku Instruktur Pengelasan BLK Kediri menyampaikan untuk pelatihan welder sendiri untuk materi yang diberikan FCAW melakukan pengelasan mulai dari posisi 1F, 2F dan 3F dan melakukan pengelasan kampuh mulai posisi 1G sampai 3G. Pengelasan diajarkan cara potong plat dan cara mengidentifikasi cacat pada plat.

“Selain itu materi yang diberikan peserta juga mendapatkan softskill untuk meningkatkan kedisiplinan, cara mencari kerja, banyak materi lain dan membentuk karakter peserta,” ucap Yannuar.

Dijelaskan Yannuar bahwa untuk peserta yang mengikuti pelatihan semuanya gratis tanpa dipungut biaya. Sarana kelengkapan berupa, baju kerja, tas, makan siang dan APD untuk praktek.

“Peserta akan mengikuti uji kompetensi las. Bagi peserta yang lolos uji kompetensi akan mendapatkan sertifikasi dari BLK Kediri dan BNSP,” ujarnya.

Ia menambahkan untuk pengelasan FCAW sendiri merupakan pengelasan semi otomatis pakai mesin dan bisa manual. Mesin las ini banyak dipakai industri besar. Seperti, galangan kapal dan proyek pembuatan kapal.

“Harapannya peserta bisa bekerja sesuai bidang las dan hasil pelatihan dan sertifikasi ini bisa mendukung teman-teman memudahkan untuk mencari pekerjaan,” harap Yannuar.

Sementara itu, salah satu peserta Ananda asal Nganjuk menuturkan yang mendorong ikut pelatihan FCAW ini untuk mendapatkan sertifikat lebih banyak lagi.

“Sebelumnya, sudah pernah ikut pelatihan dan mendapatkan sertifikat lain. Kesempatan yang ada ini saya gunakan mengikuti pelatihan di BLK Kediri,” ungkapnya.

(adv/pa)

Perumda Air Minum Waemanurung Bone Utamakan Distribusi Air Ke Pelanggan

BONE, BN - Perumda Air Minum Wae Manurung atau PDAM Bone, terus menjaga ketersediaan pasokan air bersih bagi masyarakat walaupun kondisi mata air Cinnong Ulaweng mengering.

Direktur Perumda Air Minum Wae Manurung, Muh Bachtiar Sairing, S.Sos mengatakan, pihaknya saat ini fokus memastikan distribusi air tetap berjalan normal, khususnya untuk wilayah perkotaan yang menjadi kawasan dengan kebutuhan air cukup tinggi.

Apalagi kondisi curah hujan yang masih bagus, sehingga debit air di sumber air baku masih sangat cukup untuk melayani kebutuhan air bersih masyarakat. “Untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat perkotaan, kami mengandalkan beberapa sumber air baku utamanya Wollangi,” ujarnya.

Sebelumnya pasokan air bersih untuk pelanggan di wilayah kota juga dipasok dari Cinnong Ulaweng. Namun belakangan, debit air di Cinnong, produksinya terus menurun. Penyebabnya, tidak ada lagi resapan air akibat hutan atau kebun sudah digunduli untuk tanaman jagung.

Selain menjaga debit air, Perumda juga bergerak cepat menangani berbagai gangguan teknis di lapangan, termasuk kebocoran pipa yang berpotensi mengganggu distribusi air ke pelanggan.

Menurutnya, ancaman cuaca ekstrem kedepan, menjadi tantangan serius bagi pelayanan air bersih. Karena itu, pihaknya terus melakukan pemantauan sumber air baku serta memperkuat sistem distribusi agar tetap optimal.

Perumda Wae Manurung juga menilai kebutuhan air bersih di Kabupaten Bone terus meningkat sehingga diperlukan tambahan sumber air baku baru untuk jangka panjang.

“Penambahan sumber air baku menjadi kebutuhan mendesak. Saat ini kami terus mengupayakan berbagai langkah, termasuk menggagas kerja sama dengan pihak swasta untuk pembangunan sistem jaringan baru air bersih,” katanya.

“Kalau kawasan resapan terus berkurang, tentu akan berdampak terhadap debit air baku ke depan. Ini menjadi perhatian bersama karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” tambahnya.

Perumda berharap adanya dukungan semua pihak untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kawasan sumber air demi memastikan pasokan air bersih masyarakat tetap aman. (Suspi)



Direktur Perumda Air Minum Wae Manurung, Muh Bachtiar Sairing, S.Sos.

Bupati Asahan Hadiri Pelayanan MOW, Dukung Suksesnya Peringatan HARGANAS ke-33



Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si.

ASAHAN, BN - Pada hari Selasa, 7 Juli 2026 sekira pukul 09.00 WIB, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si. menghadiri kegiatan Pelayanan Kontrasepsi Mantap Wanita atau Metode Operasi Wanita (MOW) dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke-33 Tahun 2026.

Kegiatan ini dilaksanakan di RS Sri Pamela Sei Dadap, Kabupaten Asahan. Pelayanan KB serentak ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Asahan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan Keluarga Berencana yang berkualitas.

Kegiatan ini juga menjadi langkah nyata dalam mendukung terwujudnya keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Asahan.

Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Ketua TP PKK Kabupaten Asahan, Kepala Dinas P2KB P3A, Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Direktur beserta jajaran RS Sri Pamela Sei Dadap, Camat se-Kabupaten Asahan, tenaga kesehatan, peserta pelayanan, serta tamu undangan lainnya.

Dalam rangkaian acara, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan Ny. Yusnila Indriati Taufik menyerahkan bantuan kepada 20 peserta pelayanan MOW yang berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Asahan sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pelaksanaan Program Keluarga Berencana. Selanjutnya, pelayanan operasi MOW dilaksanakan kepada para peserta sesuai dengan prosedur dan standar pelayanan kesehatan yang berlaku.

Dalam arahnya, Bupati Asahan menegaskan komitmen pemerintah daerah mendukung program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Beliau mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi, menekankan pentingnya sinergi dalam keberhasilan program ini, serta berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya perencanaan keluarga dengan pelayanan yang mengutamakan keamanan, kenyamanan, dan profesionalisme.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar hingga selesai sekira pukul 12.00 WIB. Acara kemudian diakhiri dengan sesi foto bersama dan ramah tamah antara Bupati Asahan, unsur terkait, tenaga kesehatan, serta para peserta pelayanan. (TP)

Progres Tender Gedung RSUD KRATON Negatif, Terancam Gagal Pindah



Bangunan gedung tahap ke 3 pembangunan RSUD Kraton di Wiradesa. (Dikin)

PEKALONGAN, BN - Ketua GNPK RI (Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia) Pekalongan Raya, Zaenuri, mengkritisi Isyarat dini lelang tender turun tajam dari HPS paket penyempurnaan gedung RSUD Kraton pelaksanaan pekerjaan awal bulan Juli 2026 Terkoreksi Progress Negatif.

Menurut Zaenuri, ilustrasi pada paket tender, penyempurnaan arsitektur dan infrastruktur RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2026, harga penawaran mengalami penurunan sebesar 20% dari nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Tender dengan kode lelang 10129395000 ini dimenangkan oleh PT Bina Artha Perkasa. Rincian Anggaran & Penurunan HargaNilai Pagu / HPS: Rp, 39.000.000.000,00 (39 Miliar Rupiah) Harga Penawaran Pemenang: Rp, 31.200.000.000,00 (31,2 Miliar Rupiah) Selisih Penurunan Nilai: Rp7.800.000.000,00 (7,8 Miliar Rupiah) Persentase Penurunan: 20,00% dari nilai HPS.

“Hasil analisa dari proses Lelang Pembangunan RSUD Kraton Tahun 2026 Tahap Penyelesaian, dengan penawaran Turun Tajam, yang berpotensi Ada dampak terjadinya masalah Pembangunan,” ungkap Zaenuri ketua GNPK RI Pekalongan Raya, Sabtu (11/7/2026).

Ia mengatakan bahwa proses lelang tahap penyelesaian (Tahap 3) RSUD Kraton Baru di Kampil, Wiradesa, memang berada dalam fase krusial dan berisiko tinggi karena adanya tenggat waktu penutupan gedung lama.

Selain itu, Zaenuri mempertanyakan persiapan gedung baru tempat realokasi belum siap pakai. Dimana Berdasarkan data LPSE Kabupaten Pekalongan, salah satu paket krusial seperti Penyempurnaan gedung RSUD kraton dan Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing sempat masuk dalam status Evaluasi Ulang. Penurunan harga penawaran yang terlalu tajam (seperti menyentuh 20% di bawah HPS) sering kali memicu evaluasi administrasi dan teknis yang lebih ketat demi mencegah risiko mangkrak atau hasil yang tidak sesuai standar.

“Waktu pengerjaan fisik makin mepet, proses lelang dan administrasi kontrak sudah memakan waktu sekitar 1 hingga 2 bulan,” kata Zaenuri.

Berdasarkan jadwal resmi lelang di LPSE Kabupaten Pekalongan, tender untuk paket penyempurnaan arsitektur dan Infrastruktur RSUD Kraton selesai pada 19 Juni 2026. Penandatanganan kontrak dan SPK untuk proyek ini dijadwalkan dilakukan tidak lama setelah tender tersebut, yakni pada akhir Juni 2026.

“Hal ini menyisakan waktu yang sangat mepet bagi PT Penyedia jasa untuk menyebut sisa pekerjaan arsitektur, interior, dan infrastruktur penunjang,” terangnya.

Menurutnya adakah langkah antisipasi pemerintah meskipun dibayangi risiko keterlambatan, semisal manajemen rumah sakit, guna mengambil langkah-langkah dan Komitmen Kerja Ekstra Keras, kemudian adakah upaya Komisi C DPRD Kabupaten Pekalongan dalam melakukan pengawasan melekat.

“Saya mempertanyakan optimisme pekerjaan tersebut, apakah Direktur RSUD Kraton, dr. Henny Rosita. Optimis, bahwa pihak internal terpenuhi target penyelesaian fisik pada Desember 2026 bisa tercapai, sehingga operasional penuh dapat dipindahkan awal 2027,” tegasnya.

Disamping itu, Zaenuri mempertanyakan kontingensi manajemen rumah sakit dalam menyiapkan langkah mitigasi pelayanan jika terjadi pergeseran waktu penyelesaian antara masa akhir sewa lahan lama dan kesiapan gedung baru

“Dengan ketidakpastian penundaan yang berulang-ulang jadwal relokasi RSUD Kraton ke gedung baru di wilayah Wiradesa, tentu memiliki dampak langsung dan

■ Bersambung ke hal.11 kol.5



Zaenuri ketua GNPK RI Pekalongan Raya. (Foto: dok. Dikin)

Rapat Paripurna IV DPRD Kabupaten Pasuruan
Persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025

PASURUAN, BN - Setelah memperhatikan laporan dari masing-masing komisi yang pada prinsipnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2025.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan secara resmi akhirnya mengesahkan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Pengesahan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama Pimpinan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam Rapat Paripurna IV DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (29/6/2026).

Mengawali pidato pembuka pada rapat paripurna, Samsul Hidayat, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan menerangkan pengesahan legislasi finansial ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi kelanjutan program pembangunan. Kerja sama yang solid antar-lembaga menjadi kunci utama dalam merampungkan pembahasan poin-poin krusial Raperda tepat waktu.

“Ini menjadi bahan dan referensi agar pelaksanaan APBD saat ini dan yang akan datang bisa lebih baik, akuntabel, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat,” terang Samsul Hidayat, pada Senin (29/06/2026).

Berdasarkan keputusan DPRD Nomor 5 Tahun 2026, struktur keuangan daerah menunjukkan performa yang cukup sehat dengan realisasi pendapatan menyentuh angka Rp 4.075.379.749.149,53. Di sisi lain, pos belanja daerah berhasil ditekan pada angka Rp4.022.567.100.740 hingga memicu akumulasi sisa dana segar yang cukup signifikan. Kombinasi performa tersebut menghasilkan surplus bersih sebesar Rp 52.812.648.409,53 bagi kas daerah.

Ditambah dengan sektor pembiayaan penerimaan senilai Rp 250.555.292.575,37, akumulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten Pasuruan kini tercatat mencapai Rp 303.367.940.984,90..

“Persetujuan tersebut sangat berarti bagi kami dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada tahun anggaran 2025. Semua itu merupakan masukan bagi kami bersama segenap jajaran OPD agar ke depan semakin baik,” ungkap Bupati Pasuruan, M. Rusdi Sutejo, dalam sambutannya menanggapi persetujuan Raperda oleh DPRD.

Menurutnya, rapat paripurna ini juga menjadi momentum bagi jajaran organisasi perangkat daerah untuk mencermati setiap catatan kritis yang diberikan oleh badan pemeriksa legislatif. Perbaikan tata kelola administrasi pada unit kerja terkecil akan menjadi fokus utama pembedahan.

Komitmen untuk menjaga transparansi penggunaan uang rakyat ini diharapkan dapat mendongkrak kembali kepercayaan para investor luar untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Pasuruan. Kerja sama yang harmonis ini menjadi modal sosial yang sangat berharga demi mewujudkan tatanan masyarakat Kabupaten Pasuruan yang maju, sejahtera dan berkeadilan. (*/adv)





JAWA TIMUR
GERBANG BARU
NUSANTARA



KOTA
PASURUAN



KOTA PASURUAN



#Ber
AKHLAK
Berorientasi Pelayanan Masyarakat
Harmoni Lintas Agama dan Budaya



#bangga
melayani
bangsa

Dirgahayu
REPUBLIK
INDONESIA
17 AGUSTUS 2026



INDONESIA
BERDAULAT
ADIL DAN
MAKMUR



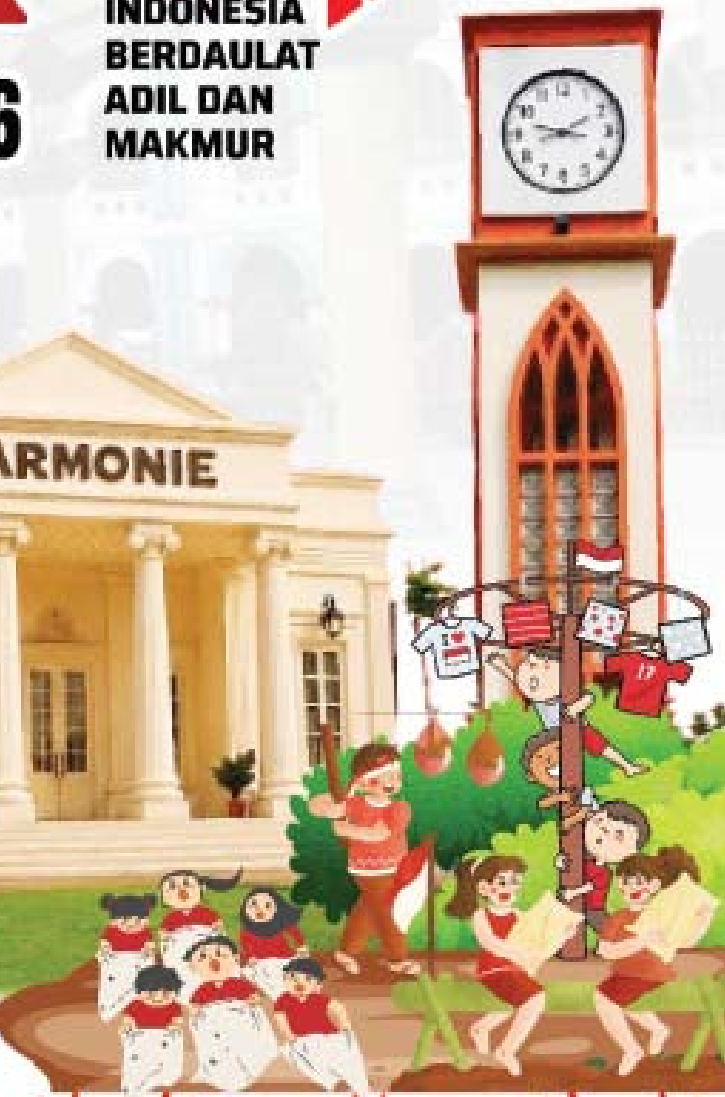
H. M. GATOT ADIDOYO
WAKIL KETUA DPRD KOTA PASURUAN



H. M. TOYIB
KETUA DPRD KOTA PASURUAN



H. ISMAIL M. HASAN, SE
WAKIL KETUA DPRD KOTA PASURUAN



HARMONIE



@dprd_pasuruan dprd.pasuruankota.go.id dprd kota pasuruan

DPRD Kepri Gelar Paripurna Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Perkuat Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah



Penyerahan dokumen rapat Paripurna DPRD Kepri. (ist)

TANJUNGPINANG, BN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau menggelar Rapat Paripurna Masa Sidang Ke-3 Tahun Anggaran 2026 dengan agenda Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LPP APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama Balai Rung Raja Khalid Hitam, Pulau Dompak, Jumat (26/06/2026).

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Dra. Hj. Dewi Kumalasari, M.Pd., serta dihadiri Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad, S.E., M.M., jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Dewi Kumalasari menjelaskan bahwa agenda paripurna tersebut merupakan bagian dari tahapan konstitusional dalam proses pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Kepulauan Riau menyampaikan sekaligus menyerahkan dokumen Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Provinsi Kepulauan Riau untuk selanjutnya dibahas sesuai mekanisme yang berlaku.

“Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD sekaligus bentuk akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, DPRD akan menjalankan proses pembahasan secara cermat dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Dewi Kumalasari.

Dalam pidatonya, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad memaparkan secara ringkas capaian realisasi APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025. Ia menyampaikan bahwa realisasi pendapatan daerah mencapai Rp3,71 triliun atau 94,94 persen dari target anggaran sebesar Rp3,91 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp3,71 triliun atau 94,48 persen dari total anggaran belanja sebesar Rp3,93 triliun. Adapun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp19,12 miliar.

“Pada kesempatan ini kami sampaikan secara singkat capaian realisasi APBD Tahun Anggaran 2025, dengan rincian anggaran Pendapatan sebesar Rp3,91 (Tiga Koma Sembilan Puluh Satu Triliun Rupiah) dan realisasi sebesar Rp3,71 (Tiga Koma Tujuh Puluh Satu Triliun Rupiah) atau 94,94%,” ujar Ansar.

“Selanjutnya, Anggaran Belanja sebesar Rp3,93 (Tiga Koma Sembilan Puluh Tiga Triliun Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp3,71 (Tiga Koma Tujuh Puluh Satu Triliun Rupiah) atau 94,48%. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau SiLPA Tahun Berkenaan adalah sebesar Rp19,12 (Sembilan Belas Koma Dua Belas Miliar Rupiah),” ungkapnya.

“Sementara itu, Neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025, Total Aset sebesar Rp6,81 (Enam Koma Delapan Puluh Satu Triliun Rupiah), Total Kewajiban Rp409,23 (Empat Ratus Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Miliar Rupiah), dan Total Ekuitas Rp6,40 (Enam Koma Empat Puluh Triliun Rupiah),” lanjutnya.

Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Provinsi Kepulauan Riau atas sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin selama proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

“Segala capaian yang diraih tentunya tidak terlepas dari kolaborasi dan sinergi yang erat antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Oleh karena itu, atas nama jajaran eksekutif saya mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada seluruh anggota dewan atas kebersamaan, masukan yang berharga, serta fungsi pengawasan yang telah diberikan selama ini,” tuturnya.

“Kami berharap Ranperda ini dibahas secara objektif dan konstruktif untuk dapat ditetapkan sebagai Peraturan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Kami juga terbuka terhadap segala masukan dan catatan dewan yang terjamin guna menyempurnakan laporan pertanggungjawaban ini serta menjadikannya sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan,” tutupnya.

Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah yang mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Sesuai mekanisme pembahasan peraturan daerah, tahapan berikutnya adalah penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Melalui rapat paripurna tersebut, DPRD menetapkan pelaksanaan rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi akan dilaksanakan pada Selasa, 30 Juni 2026, yang kemudian dilanjutkan dengan rapat Badan Musyawarah (Banmus) untuk menyusun agenda kegiatan DPRD Provinsi Kepulauan Riau selama bulan Juli 2026.

Melalui rangkaian pembahasan ini, DPRD Provinsi Kepulauan Riau kembali menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara profesional, transparan, serta bertanggung jawab. Sinergi yang terjalin antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diharapkan terus menjadi fondasi yang kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan daerah yang berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau.

(Perwakilan Kepri/Handoko)

Bupati Pinrang Hadiri Porsenijar PGRI Sulawesi Selatan



Bupati Pinrang H.A. Irwan Hamid, S.Sos saat menghadiri sekaligus memimpin defile Kontingen PGRI Kabupaten Pinrang. (ist)

PINRANG, BN - Ajang Pekan Olahraga, Seni, dan Pembelajaran (Porsenijar) PGRI Provinsi Sulawesi Selatan tidak hanya menjadi wadah kompetisi bagi insan pendidikan, tetapi juga menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi, meningkatkan semangat berprestasi, serta membangun kebersamaan di kalangan guru sebagai ujung tombak pembangunan sumber daya manusia.

Hal ini terlihat saat Bupati Pinrang H.A. Irwan Hamid, S.Sos hadir sekaligus memimpin langsung defile Kontingen PGRI Kabupaten Pinrang pada pembukaan Porsenijar PGRI Provinsi Sulawesi Selatan yang dipusatkan di Stadion Gaggawa, Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Kamis (2/7/2026).

Kegiatan secara resmi dibuka oleh Gubernur Sulawesi Selatan A. Sudirman Sulaiman diikuti puluhan ribu peserta dari seluruh kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Kabupaten Pinrang sendiri mengirimkan sekitar 3.500 peserta, yang tampil penuh semangat saat mengikuti defile pembukaan.

Di sela-sela kegiatan, Bupati Irwan mengungkapkan bahwa Porsenijar bukan sekadar ajang perlombaan, tetapi juga menjadi media untuk memperkuat solidaritas antar pendidik sekaligus meningkatkan motivasi dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul.

Menurutnya, guru memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk karakter, kecerdasan, dan masa depan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, ruang-ruang yang mampu membangun semangat, kreativitas, dan kebersamaan para pendidik harus terus didukung.

“Melalui kegiatan seperti ini, para guru tidak hanya diberi ruang untuk menunjukkan kemampuan di bidang olahraga, seni, dan kreativitas, tetapi juga memperkuat silaturahmi, bertukar pengalaman, serta membawa semangat baru dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah,” ungkap Bupati Irwan.

Bupati Irwan juga berharap seluruh kontingen Kabupaten Pinrang mampu memberikan penampilan terbaik pada setiap cabang yang dipertandingkan. Namun lebih dari itu, dirinya berpesan agar seluruh peserta senantiasa menjunjung tinggi sportivitas, disiplin, kebersamaan, serta menjaga nama baik Kabupaten Pinrang selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

Menurutnya, nilai-nilai sportivitas yang tumbuh dalam kompetisi akan menjadi bekal penting dalam membangun budaya kerja yang sehat, saling menghargai, dan penuh kolaborasi di lingkungan pendidikan, yang pada akhirnya akan bermuara pada meningkatnya kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat. (*/syabir/hans)

Andi Harisuddin Cetak Sejarah, Raih 5 Kali Juara 1 Berturut-turut Ikrar Guru se Sulsel



Andi Harisuddin saat terima trophy juara. (ist)

PINRANG, BN - Andi Harisuddin harumkan nama baik Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan. Dengan raih juara ke lima kalinya secara berturut turut pengucapan ikrar guru indonesia di Tingkat Provinsi, Kabupaten Bantaeng, Barru, Soppeng dan Sidrap.

Prestasi gemilang kembali diraih oleh kepala sekolah temama di Kabupaten Pinrang UPT SDN 161 Pinrang. Kepsek 161 pinrang sukses meraih podium/ juara yang ke lima kalinya secara berturut turut. Pada acara besar perhelatan akbar

tiap 2 tahunan Porsenijar PGRI Sulsel Andi Harisuddin membuktikan diri bahwa kemampuannya di bidang menghafal sangat luar biasa. Daya ingat yang dimilikinya sangat tajam lafal, dan intonasi tiap ucapan sangat pas. Serta penampilan yang spectacular sehingga menempatkan Kepala Sekolah berprestasi ini meraih podium 5 kali berturut turut tanpa putus pada Lomba Pengucapan Ikrar Guru Indonesia Tingkat Propinsi .

Bupati Pinrang H.A. Irwan Hamid, S.Sos, dan wakil Bupati Sudirman Bungin, S.P.M. Si selalu mendukung perjuangan ini semoga raihnan prestasi ini menjadi semangat untuk berbuat yang terbaik untuk Kab. Pinrang. (Sabir)

Maknai Hari Bhayangkara ke-80, Kapolres Bintang : Jadikan Semangat Pahlawan dalam Bertugas



Kapolres Bintang, AKBP Argya Satrya Bhawana, S.H., S.I.K., dan pejabat utama (PJU) Polres Bintang, serta personel Brimob saat ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Dwikora Tanjung Uban, Kecamatan Bintang Utara. (ist)

BINTAN, BN

- Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Bintang menggelar upacara ziarah rombongan dan tabur bunga di wilayah hukum Polsek Bintang Utara yang mana kegiatan ini menjadi momen

refleksi penting bagi seluruh jajaran kepolisian untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur demi bangsa dan negara pada hari ini Rabu (24/6/2026).

Rangkaian kegiatan khidmat tersebut diawali di Taman Makam Pahlawan (TMP) Dwikora Tanjung Uban, Kecamatan Bintang Utara. Upacara ziarah dipimpin langsung oleh Kapolres Bintang, AKBP Argya Satrya Bhawana, S.H., S.I.K., dan dihadiri oleh pejabat utama (PJU) Polres Bintang, personel Brimob Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Kepri, perwakilan Polsek jajaran, serta pengurus Bhayangkari Cabang Bintang.

Suasana haru dan penuh penghormatan menyelimuti TMP Dwikora saat Kapolres Bintang meletakkan karangan bunga di monumen pahlawan, yang kemudian dilanjutkan dengan prosesi tabur bunga di makam para pejuang oleh seluruh peserta upacara. Setelah prosesi di makam pahlawan selesai, rombongan langsung bergerak menuju Dermaga Pelabuhan Kota Sagara, Kampung Mentigi, untuk melaksanakan upacara larung bunga di laut sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang gugur di samudra.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Bintang AKBP Argya Satrya Bhawana, S.H., S.I.K., menyampaikan bahwa peringatan Hari Bhayangkara ke-80 ini harus dijadikan momentum bagi seluruh personel Polri untuk meneladani nilai-nilai perjuangan terdahulu. “Ziarah dan tabur bunga ini bukan sekadar tradisi seremonial tahunan, melainkan wujud penghormatan tertinggi kita atas pengorbanan darah dan air mata para pahlawan. Di usia Bhayangkara yang ke-80 ini, saya meminta seluruh personel Polres Bintang dan jajaran untuk tidak pernah melupakan sejarah,” tegas AKBP Argya.

Lebih lanjut, Kapolres memberikan motivasi pembakar semangat kepada seluruh anggotanya agar mengadopsi semangat juang pahlawan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). “Tantangan tugas Polri ke depan akan semakin kompleks. Oleh karena itu, jadikan tekad dan semangat pantang menyerah para pahlawan sebagai kompas kita dalam bertugas. Jika dulu para pahlawan berjuang dengan senjata melawan penjajah, maka perjuangan kita hari ini adalah memberikan pelayanan terbaik, rasa aman, dan keadilan bagi masyarakat. Mari kita tingkatkan disiplin, loyalitas, dan dedikasi tanpa pamrih demi institusi dan tanah air,” tambahnya membakar semangat personel.

Seluruh rangkaian kegiatan peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di wilayah hukum Polsek Bintang Utara yang dilaksanakan hari ini berjalan dengan sangat khidmat, aman, dan kondusif, memancarkan kesiapan Polres Bintang dalam terus mengabdikan dan melindungi masyarakat. (Perwakilan Kepri, Handoko)

Bupati Asahan Sambut Kunjungan Ketua Komisi VII DPR RI dan Gubernur Sumut di Paviliun Asahan PRSU 2026

ASAHAN, BN -Kamis (9/7/2026) sekira pukul 16.45 WIB, Paviliun Kabupaten Asahan di ajang Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) 2026 dikunjungi oleh Ketua Tim Komisi VII DPR RI, Dr. Evita Nursanty, M.Sc., beserta rombongan. Kunjungan ini berlangsung dengan didampingi langsung oleh Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, serta disambut hangat oleh Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., Sekretaris Daerah, kepala OPD dan pejabat terkait lingkup Pemkab Asahan.

PRSU 2026 yang mengusung tema “Harmoni Emas dengan Semangat Kolaborasi Tradisi, Bangkitkan Inspirasi” merupakan ajang promosi budaya, perdagangan, investasi dan ekonomi kreatif terbesar di Sumatera Utara. Berlangsung sejak 3 Juli hingga 2 Agustus 2026, kegiatan ini menampilkan beragam pameran produk UMKM, seni budaya serta kolaborasi pelaku industry dari seluruh kabupaten dan kota se-Sumatera Utara.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Asahan memaparkan berbagai potensi unggulan daerah sekaligus mengantar rombongan meninjau koleksi yang dipamerkan, mulai dari ikon khas daerah Sepatu Bunut, bibit kultur jaringan PT Hijau Surya Biotechindo, hingga beragam produk unggulan UMKM lainnya. Secara khusus Bupati menyoroti perkembangan industri Sepatu Bunut yang dinilai memiliki peluang besar menembus pasar nasional maupun internasional.



Bupati menjelaskan bahwa industri Sepatu Bunut telah berkembang sejak tahun 1998, berpusat di sepanjang Jalan Lintas Sumatera tepatnya di Kelurahan Bunut dan Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kisaran Barat, sekitar 3,5 kilometer dari kompleks Kantor Bupati.

Produk khas ini memiliki ciri unik berupa model tanpa tali dan tanpa tumit, dengan teknik jahitan khusus yang menyatukan tapak hingga bagian atas sehingga menghasilkan sepatu yang kokoh, awet dan harga terjangkau.

Ketua Tim Komisi VII DPR RI memberikan apresiasi tinggi terhadap kualitas dan keunikan Sepatu Bunut serta beragam produk Asahan lainnya. Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap produk lokal, beliau bahkan membeli satu pasang Sepatu Bunut ukuran 38, sekaligus berharap Pemkab Asahan terus memperkuat pendampingan dan pembinaan agar para pengrajin semakin

inovatif dan mampu memperluas jangkauan pasar.

Bupati Asahan menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan dukungan tersebut, yang diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah daerah maupun para pelaku usaha lokal. Melalui partisipasi di PRSU 2026, Pemkab Asahan menargetkan produk unggulan daerah semakin dikenal luas, daya saing meningkat, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Asahan. Kunjungan berakhir sekira pukul 17.15 WIB ditutup dengan sesi foto bersama. (TP)

Kapolda Babel Minta Jajarannya Awasi Pendistribusian BBM Subsidi

BABEL, BN - Kapolda Bangka Belitung (Babel) Irjen Pol Viktor T. Sihombing memastikan pihaknya akan melakukan pengawasan terkait pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Hal ini disampaikan menindaklanjuti hasil pertemuan dengan PT. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel dan perwakilan SPBU di Mapolda pada Selasa (14/7/26). “Tadi kami audiensi dengan Pertamina dan perwakilan SPBU terkait antisipasi pendistribusian BBM melalui SPBU yang belakangan ini ada banyak antrean panjang dilapangan,” kata Irjen Pol Viktor di Mapolda. “Sekalian melihat apa problem permasalahan dan kami lihat ada solusi-solusi yang akan nanti akan dibawa ke rapat bersama Pemda besok. Mudah-mudahan ada solusi untuk antisipasinya,” timpalnya. Kapolda juga mengingatkan agar pendistribusian



Kapolda Bangka Belitung (Babel) Irjen Pol Viktor T. Sihombing. (ist)

BBM bersubsidi harus disalurkan kepada sesuai peruntukannya. “Oleh sebab itu kita bekerjasama dengan Pertamina, SPBU dan Pemerintah Daerah termasuk kita mengimbau masyarakat supaya nanti tidak ada penyelewengan BBM subsidi,” terangnya. Mengenai antrean panjang di sejumlah SPBU, Viktor juga telah memerintahkan jajarannya untuk turun ke lapangan untuk mengatur arus lalu lintas sehingga tidak terjadi kemacetan. “Yang jelas lalu lintas harus tetap terjaga dan tidak boleh macet dan penyelewengan BBM subsidi harus bisa diantisipasi. Kami juga akan melakukan tindakan-tindakan termasuk penegakkan hukum,” katanya. Ia menegaskan tidak akan pandang bulu jika nantinya ditemukan adanya pelanggaran hukum terkait penyaluran BBM bersubsidi termasuk jika ditemukan adanya keterlibatan anggotanya. (sumber : babel.id/as)

PT TIMAH Dukung Percantik Geosite Belitong UNESCO Global Geopark

BELITUNG TIMUR, BN - Komitmen PT TIMAH (Persero) Tbk dalam mendukung pelestarian warisan geologi, budaya, dan pengembangan pariwisata berkelanjutan kembali diwujudkan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Kali ini, PT TIMAH mendukung revitalisasi display perahu kate di kawasan Geosite Pantai Burung Mandi, Kabupaten Belitung Timur, sebagai bagian dari penguatan revalidasi Belitong UNESCO Global Geopark (UGGp) Tahun 2026. Dukungan tersebut diwujudkan melalui rehabilitasi dan pengecatan ulang display perahu kate, salah satu ikon budaya masyarakat pesisir Belitung Timur yang menjadi media edukasi bagi wisatawan di kawasan geosite. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur, Muhammad Yulhaidir, mengapresiasi kontribusi PT TIMAH yang dinilai membantu meningkatkan kesiapan kawasan Burung Mandi menghadapi proses revalidasi dan dinilai berkontribusi memperkuat daya tarik destinasi wisata berbasis geopark di Belitung Timur. “Melalui dukungan CSR PT TIMAH, kami mengucapkan terima kasih karena telah membantu revitalisasi display kate di Desa Burung Mandi. Ini merupakan salah satu objek yang akan menjadi bagian dari penilaian dalam Belitong Geopark,” ujarnya. Ia menjelaskan, menjelang proses revalidasi, berbagai titik geosite di Kabupaten Belitung Timur terus dibenahi. Namun, dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah Daerah, mereka menilai kolaborasi dari berbagai pihak sangat penting untuk



Kawasan Geosite Pantai Burung Mandi, Kabupaten Belitung Timur, sebagai bagian dari penguatan revalidasi Belitong UNESCO Global Geopark (UGGp) Tahun 2026. (ist)

mendukung pengembangan wisata. “Kami berharap seluruh upaya ini dapat mendukung peningkatan status Geopark Belitung menjadi hijau pada proses revalidasi yang dijadwalkan berlangsung awal Agustus mendatang,” katanya. Menurutnya, pengembangan Geopark tidak hanya menonjolkan kekayaan geologi, tetapi juga mengangkat nilai budaya (geo culture) dan pemberdayaan masyarakat lokal. “Display kate ini menjadi media informasi yang menceritakan budaya masyarakat nelayan Belitung Timur. Pengunjung tidak hanya melihat, tetapi juga bisa memahami sejarah dan fungsi perahu kate sebagai identitas masyarakat pesisir,” ujarnya. Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Burung Mandi, Herkoles, mengatakan bantuan revitalisasi display kate memberikan dampak positif bagi pengembangan wisata di desa tersebut. Menurutnya, display perahu kate yang dibangun sejak 2018 sebelumnya sudah mengalami kerusakan akibat faktor usia sehingga membutuhkan perbaikan. “Display kate ini menjadi sarana bagi kami untuk menjelaskan kepada wisatawan tentang sejarah dan fungsi perahu kate sebagai ciri khas nelayan Burung Mandi. Kini tampilannya kembali menarik sehingga dapat mendukung kegiatan pemanduan wisata,” katanya. Ia menjelaskan, Pantai Burung Mandi memiliki keunikan karena memadukan kekayaan kuliner laut dengan budaya nelayan. Salah satu ikon yang diangkat adalah ikan kerisi yang ditangkup menggunakan perahu kate, sehingga menjadi cerita menarik bagi wisatawan. (sumber ; babelpos.id/as)

Kawasan Wisata Lumbok Seminung Bakal Dikembangkan

LAMPUNG BARAT, BN - Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menyambut positif rencana pengembangan Kawasan Wisata Lumbok Seminung Resort yang dipresentasikan oleh PT. Eljohn Tirta Emas Wisata dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Pesagi, Setdakab Lampung Barat, Selasa (14/07/2026). Presentasi tersebut dihadiri Wakil Bupati Lampung Barat Drs. Mad Hasnurin, Sekretaris Daerah, para Asisten, serta Kepala Perangkat Daerah terkait. Dalam paparannya, PT. Eljohn Tirta Emas Wisata menyampaikan rencana induk pengembangan kawasan wisata terpadu dan pasar tematik Lumbok Seminung. Pengembangan tersebut meliputi renovasi dan peningkatan kualitas hotel, restoran, serta ruang pertemuan, pembangunan cafe tematik, peningkatan fasilitas glamping, pengembangan pasar tematik, hingga penambahan berbagai objek wisata seperti area berkemah di tepi Danau Ranau, wahana



Wakil Bupati Lampung Barat Drs. Mad Hasnurin, saat memimpin rapat.

permainan air, dan fasilitas pendukung wisata lainnya. Bupati Lampung Barat H. Parosil Mabsus dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menyambut baik kehadiran PT. Eljohn Tirta Emas Wisata yang berkomitmen mengembangkan Kawasan Wisata Lumbok Seminung. Menurutnya, Lumbok Seminung memiliki potensi wisata yang sangat besar sehingga perlu dioptimalkan melalui pengembangan fasilitas yang memadai serta pengelolaan kawasan secara berkelanjutan.

“Lumbok Seminung memiliki potensi wisata yang kuat. Langkah berikutnya adalah mengoptimalkan potensi tersebut melalui pengembangan fasilitas dan aktivitas kawasan secara berkelanjutan,” ujarnya. Lebih lanjut, Parosil berharap kerja sama tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. “Harapan pemerintah daerah, kerja sama ini memberikan dampak positif bagi masyarakat serta mampu meningkatkan pendapatan daerah. Saya juga berharap pembangunan ini melibatkan masyarakat setempat sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat sekitar,” jelasnya. Ia optimis kehadiran PT. Eljohn Tirta Emas Wisata akan menjadi daya tarik bagi investor lain untuk ikut mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Lampung Barat. (Taufik)

Tinjau TPA Sunan Bonang Pasca Kebakaran, Bupati Parosil Serahkan Bantuan



Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus saat meninjau lokasi kebakaran Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) Sunan Bonang.

LAMPUNG BARAT, BN - Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus meninjau langsung lokasi kebakaran Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) Sunan Bonang di Pekon Padang Cahya, Kecamatan Balik Bukit, Selasa (14/07/2026). Kunjungan ini untuk memberikan dukungan moril sekaligus menyerahkan bantuan kepada keluarga yang terdampak. Turut mendampingi, Wakil Bupati Mad Hasnurin, Kepala Perangkat Daerah, Camat Balik Bukit Mat Patoni, dan Kepala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lampung Barat Abdul Rosid. Untuk diketahui, kebakaran terjadi pada Rabu (08/07/2026) pagi di wilayah Pekon Padang Cahya. Peristiwa tersebut menghancurkan satu bangunan yang digunakan sebagai tempat pengajian anak sekaligus rumah milik warga. Diduga kebakaran dipicu oleh korsleting listrik. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun kerugian materi ditaksir mencapai sekitar Rp300 juta. Dalam kunjungannya, Bupati Lampung Barat menyerahkan bantuan yang bersumber dari Baznas Lampung Barat kepada pengurus TPA Sunan Bonang. Bupati menyampaikan permohonan maaf karena baru bisa hadir. “Yang namanya musibah sudah menjadi sebuah takdir dan kehendak. Kita berdoa apa yang menimpa keluarga besar TPA Sunan Bonang ini mendapat hikmah yang baik,” ujar Bupati. Bupati berharap musibah ini menjadi pelajaran bagi seluruh masyarakat untuk lebih waspada. “Kita tidak tahu faktornya. Bisa saja penyebabnya kelalaian dari kita. Terkadang kita tidak sadar colokan listrik kita terlalu banyak sehingga menimbulkan potensi korsleting listrik. Mari kita sama-sama mawas diri agar musibah seperti ini tidak terjadi lagi,” tambahnya. Bupati Lampung Barat juga mengimbau masyarakat agar selalu memperhatikan instalasi listrik dan kompor saat hendak bepergian. “Perhatikan listrik, kompor saat hendak bepergian. Karena itu yang berpotensi besar mengakibatkan kebakaran,” pesan Parosil. (Taufik)

Sah! Damar Mata Kucing Krui Resmi Kantongi Sertifikat Indikasi Geografis



PESISIR BARAT, BN - Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, menghadiri kegiatan Audiensi dan Penyerahan Sertifikat Indikasi Geografis (IG) Damar Mata Kucing Krui yang berlangsung di Ruang Payung Agung, Lantai 4, Selasa (14/7/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Lampung, Taufiqurrahman, S.Sos., S.H., M.Si., beserta jajaran, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pesisir Barat, Ir. Armand Achyuni, unsur Forkopimda, Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Heri Gunawan, Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan, perwakilan petani dan pedagang Damar Krui, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dalam sambutannya, Bupati Dedi Irawan menyampaikan bahwa penyerahan Sertifikat Indikasi Geografis Damar Mata Kucing Krui merupakan momentum bersejarah bagi Kabupaten Pesisir Barat. Menurutnya, pengakuan tersebut bukan hanya menjadi bentuk apresiasi terhadap kualitas produk unggulan daerah, tetapi juga penghormatan atas warisan budaya dan kearifan lokal masyarakat yang selama ini menjaga keberlangsungan Repong Damar secara turun-temurun. “Hari ini merupakan hari yang membanggakan bagi Kabupaten Pesisir Barat. Penyerahan sertifikat ini menjadi pengakuan atas kualitas Damar Mata Kucing Krui sekaligus penghormatan terhadap perjuangan para petani yang menjaga Repong Damar,” ujar Bupati. Bupati menegaskan bahwa diperolehnya Sertifikat Indikasi Geografis bukanlah akhir dari sebuah perjuangan, melainkan awal untuk terus menjaga mutu produk, memperkuat kelembagaan petani, memperluas akses pasar, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Lampung, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), kalangan akademisi, para pendamping, serta seluruh petani damar yang telah berkontribusi menjaga dan melestarikan warisan berharga tersebut. “Repong Damar mengajarkan kepada kita bahwa alam yang dijaga dengan penuh cinta akan menghadirkan kehidupan yang berkelanjutan,” ujar Bupati. (TAUFIK)

Pemkab Siapkan Arah Pembangunan Pesibar Hingga 2046



BANDAR LAMPUNG, BN - Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) terus mematangkan arah pembangunan daerah untuk dua dekade ke depan melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2026-2046. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Pleno Forum Penataan Ruang (FPR) Provinsi Lampung yang membahas sinkronisasi substansi Ranperda RTRW, berlangsung di Bandar Lampung, Selasa (14/7/2026). Rapat pleno dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M. Turut hadir Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Lampung yang diwakili Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, Vika Vitri Indra Bangsawan, S.T., M.Sc., serta tokoh masyarakat, budayawan, akademisi, pakar teknik sipil, dan pegiat pelestarian lingkungan yang juga merupakan anggota Forum Penataan Ruang Provinsi Lampung, Ir. Anshori Djausal, S.T.. Rapat dipimpin oleh Ketua Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Provinsi Lampung, M. Bobby Rahman, S.T., M.Si. (Han), Ph.D. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat didampingi jajaran perangkat daerah yang tergabung dalam Tim Penyusunan RTRW Kabupaten Pesisir Barat, yakni Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, serta Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Barat. Dalam arahannya, Ir. Anshori Djausal menegaskan bahwa dokumen RTRW merupakan instrumen strategis yang akan menentukan arah pembangunan dan masa depan suatu daerah. Karena itu, penyusunannya harus mampu memproyeksikan berbagai potensi, tantangan, dan kebutuhan pembangunan agar menjadi pedoman yang terarah, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (Rilis/ Taufik)

Dua Santri Raih Beasiswa ke Mesir, Wabup Labuhanbatu Hadiri Tabligh Akbar di Ponpes Addinussyarifiah

LABUHANBATU, BN – Wakil Bupati Labuhanbatu, H. Jamri ST, menghadiri acara Tabligh Akbar yang digelar di Pondok Pesantren Addinussyarifiah, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan, pada Rabu (15/6/2026). Momentum religius ini sekaligus dirangkai dengan penyambutan santri baru serta tasyakuran atas prestasi gemilang dua santri setempat yang berhasil meraih beasiswa ke Universitas Al-Azhar, Mesir.

Kehadiran Wakil Bupati turut didampingi oleh Ketua TP-PKK Kabupaten Labuhanbatu, Ny. Hj. Wan Juma Sari Dewi, beserta jajaran unsur forkopimda dan tokoh masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Wabup H. Jamri menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar Pondok Pesantren Addinussyarifiah atas inisiasi penyelenggaraan acara ini. Menurutnya, kegiatan keagamaan seperti Tabligh Akbar bukan sekadar rutinitas, melainkan momentum penting untuk mempererat ukhuwah Islamiyah dan menjaga persatuan di tengah masyarakat.

“Di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat, tantangan terbesar kita adalah membina generasi muda. Oleh karena itu, peran pondok pesantren menjadi semakin strategis. Lembaga ini tidak hanya mencetak generasi yang cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia dan memiliki kecintaan yang mendalam terhadap agama serta negara,” ujar H. Jamri. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh panitia, donatur, dan pengurus yayasan yang telah bekerja keras menyukseskan acara ini.

Rasa bangga juga diungkapkan oleh Kepala Desa Tanjung Harapan, Rustam Efendi Ritonga. Ia berharap kehadiran tokoh-tokoh agama besar di desa mereka dapat menjadi suntikan motivasi bagi para santri yang sedang menimba ilmu.



Wakil Bupati Labuhanbatu, H. Jamri, ST. (sukma)

“Kami sangat bangga atas kehadiran ustaz kondang dan Qori internasional di desa kami. Semoga ini menjadi pemantik semangat bagi anak-anak kita di pesantren agar semakin giat mempelajari ilmu agama maupun ilmu umum,” ungkap Rustam. Pada kesempatan yang sama, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Addinussyarifiah, Fadli Haqqi Romadhona Ritonga, memaparkan kilas balik pesantren yang didirikan oleh Sabuddin Ritonga sejak tahun 1996 tersebut. Fadli dengan penuh rasa syukur mengumumkan pencapaian luar biasa yang diraih oleh anak didiknya tahun ini.

“Hari ini menjadi momen yang sangat bersejarah bagi kami. Selain menyambut santri dan santriwati baru, kami juga melepas dua santri terbaik kami yaitu Muhammad Aidil Syahputra Rambe dan Muhammad Rafhi yang dinyatakan lulus dan mendapatkan beasiswa penuh untuk melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar, Mesir,” jelas Fadli.

Suasana Tabligh Akbar berlangsung khidmat saat Qori internasional, Darwin Hasibuan, S.Pd.I, melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur’an dengan begitu syahdu. Acara kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah agama yang disampaikan oleh Ustadz Anugrah Cahyadi, atau yang akrab disapa Ustadz Ucy. Dalam ceramahnya, Ustadz Ucy mengajak para jamaah dan orang tua santri untuk konsisten menjaga keimanan serta mendukung pendidikan karakter anak sejak dini.

Turut hadir dalam acara tersebut Danramil 09/Negeri Lama Kapten Inf. A. Diwan Manik, perwakilan dari Polres Labuhanbatu, Camat Pangkatan, perwakilan Kantor Kementerian Agama (Kemenag), pengurus PKK tingkat kecamatan dan desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ratusan orang tua santri dan tamu undangan lainnya. (M.Sukma)

Bupati Pinrang Hadiri Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026



Bupati Pinrang H.A. Irwan Hamid, S.Sos. (ist)

PINRANG, BN -Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Tanpa situasi yang aman dan kondusif, berbagai program pembangunan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentu tidak dapat berjalan secara optimal.

Hal ini menjadi semangat yang mengemuka dalam Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 tingkat Kabupaten Pinrang yang digelar di Markas Komando Kepolisian Resor Pinrang, Rabu (1/7/2026). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Pinrang H.A. Irwan Hamid, S.Sos, bersama Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungsi, S.IP., M.Si.

Pada kesempatan tersebut, Kapolres Pinrang AKBP Edy Sabhara Manggabarani bertindak selaku inspektur upacara sekaligus membacakan amanat tertulis Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Dalam amanatnya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa tema “Polri untuk Masyarakat” pada peringatan Hari Bhayangkara ke-80 bukan sekadar slogan, namun harus menjadi jati diri, arah pengabdian, sekaligus kompas moral bagi setiap insan Bhayangkara.

Menurut Presiden, Polri harus senantiasa hadir di tengah masyarakat, bekerja dengan penuh dedikasi, memberikan perlindungan kepada rakyat serta mengabdikan kepada bangsa dan negara.

Presiden juga mengingatkan bahwa di tengah transformasi besar yang tengah dilakukan bangsa Indonesia pada sektor ekonomi, birokrasi, pendidikan, pangan hingga energi, seluruh elemen bangsa harus tetap optimistis mewujudkan Indonesia yang modern, makmur dan berdiri di atas kedaulatannya sendiri.

Untuk itu, lanjut Presiden, Polri dituntut terus melakukan transformasi menuju institusi yang semakin profesional, modern dan semakin dekat dengan masyarakat. Di akhir amanatnya, Presiden Prabowo turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Polri yang telah mengabdikan diri siang dan malam dalam menjaga keamanan, ketertiban dan stabilitas nasional, sekaligus mengucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh insan Bhayangkara.

Sementara itu, Bupati Pinrang H.A. Irwan Hamid mengungkapkan bahwa peran Polri selama ini sangat dalam mendukung jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pinrang. (*syabir/hans)

Pemkab Pinrang Fokus Berdayakan Angkatan Kerja



Wakil Bupati Pinrang, Sudirman Bungsi, S.IP., M.Si (ist)

PINRANG, BN - Pemerintah Kabupaten Pinrang terus memperkuat upaya dalam menekan angka pengangguran dengan memastikan setiap program ketenagakerjaan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan mampu membuka peluang kerja yang lebih luas.

Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Pinrang, Sudirman Bungsi, S.IP., M.Si, saat memimpin langsung rapat koordinasi ketenagakerjaan yang digelar di ruang rapat Bupati Pinrang, Rabu (8/7/2026).

Dalam arahannya, Wabup Sudirman mengungkapkan bahwa, fokus Pemerintah Kabupaten Pinrang saat ini adalah memberdayakan angkatan kerja berdasarkan data yang telah dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pinrang melalui Sensus Ekonomi Tahun 2026.

Menurutnya, data yang akurat harus menjadi landasan dalam menyusun setiap kebijakan agar program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. “Seluruh program ketenagakerjaan harus disusun berdasarkan data yang riil. Dengan begitu, setiap kebijakan yang diambil dapat terukur, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang hingga saat ini belum mendapatkan kesempatan kerja,” ungkap Wabup Sudirman.

Lebih lanjut, dirinya menegaskan agar perangkat daerah yang memiliki program pemberdayaan tenaga kerja mampu menyelaraskan setiap kegiatan dengan kondisi riil angkatan kerja di Kabupaten Pinrang. Tidak hanya memperhatikan tingkat pendidikan atau kemampuan akademik, namun juga keterampilan dan kompetensi lain yang dibutuhkan dunia kerja saat ini.

Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi perhatian bersama agar angkatan kerja Kabupaten Pinrang memiliki daya saing dan mampu terserap pada berbagai sektor usaha maupun industri.

Olehnya itu, Wabup Sudirman meminta seluruh perangkat daerah terkait membangun sinergi yang lebih erat dengan BPS Kabupaten Pinrang dalam melakukan analisis terhadap kondisi ketenagakerjaan. (*syabir/hans)

Ciptakan Lingkungan Sekolah Bebas Narkoba, Satresnarkoba Polres Labuhanbatu Edukasi Siswa Baru



Satresnarkoba Polres Labuhanbatu saat sosialisasi bahaya Narkoba di SMK Muhammadiyah 3 Aek Kenopan.

LABURA, BN – Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Kabupaten Labuhanbatu terus mengintensifkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar. Salah satunya melalui sosialisasi bahaya narkoba kepada peserta didik baru dalam kegiatan Forum Ta’aruf

dan Orientasi siswa (FORTASI) dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMK Muhammadiyah 3 Aek Kenopan jalan KH Ahmad Dahlan No. 16 Kelurahan Aek kenopar Timur Kecamatan Kualu Hulu, kabupaten Labuhanbatu Utara provinsi Sumatera Utara Kamis (16/7/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula COE SMKS Muhammadiyah 3 tersebut dipimpin KBO IPTU R.Damanik, Sosialisasi ini menjadi bagian dari komitmen Polres Kabupaten Labuhanbatu dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Dalam sambutannya, IPTU R.Damanik menegaskan bahwa pelajar merupakan generasi penerus bangsa yang harus dibentengi sejak dini dari ancaman narkoba. Para siswa diberikan pemahaman mengenai ciri-ciri narkotika, jenis-jenis narkoba yang kerap beredar di masyarakat, serta berbagai modus yang digunakan pelaku peredaran gelap untuk menasar kalangan remaja.

Selain itu, dijelaskan pula dampak penyalahgunaan narkotika terhadap kesehatan fisik dan mental, prestasi belajar, kehidupan sosial, hingga ancaman pidana bagi para pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

IPTU R Damanik juga mengajak seluruh siswa untuk menjadi pelopor gerakan anti narkoba di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Menurutnya, pencegahan penyalahgunaan narkoba membutuhkan peran aktif seluruh elemen, termasuk generasi muda. (M. SUKMA)

Tim Penggerak PKK Kabupaten Pinrang Dukung Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat



Ketua TP PKK Kabupaten Pinrang Sri Widiati A. Irwan.

PINRANG, BN - Komitmen Tim Penggerak PKK Kabupaten Pinrang dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat kembali ditunjukkan melalui keikutsertaannya pada Pembukaan Pameran UMKM, Cek Kesehatan Gratis, dan Pemecahan Rekor MURI Minum Multiple Micronutrient Supplement (MMS) Serentak bagi Ibu Hamil yang digelar di Hotel Claro

Makassar, Kamis (9/7/2026).

Kegiatan yang merupakan rangkaian peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Tahun 2026 ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum TP PKK Pusat Ny. Tri Tito Karnavian, Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan Ny. Naoemi Oktarina Sudirman, serta seluruh Ketua dan jajaran pengurus TP PKK Kabupaten/Kota se-Provinsi

Sulawesi Selatan.

Ketua TP PKK Kabupaten Pinrang Sri Widiati A. Irwan mengungkapkan bahwa, keikutsertaan TP PKK Pinrang pada kegiatan ini merupakan bentuk komitmen untuk terus mendorong dua sektor yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, yakni pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta peningkatan kesehatan ibu dan anak.

Menurut Sri Widiati, sektor UMKM memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan. Olehnya itu, kesempatan mengikuti pameran ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memperkenalkan berbagai

produk unggulan hasil produksi pelaku UMKM Kabupaten Pinrang kepada masyarakat yang lebih luas.

“Semakin luas produk UMKM kita dikenal, maka semakin besar pula peluang pasar yang terbuka. Hal ini tentu akan berdampak pada peningkatan pendapatan para pelaku usaha dan pada akhirnya ikut menggerakkan perekonomian masyarakat,” ungkap Sri Widiati.

Selain mendukung sektor ekonomi, TP PKK Kabupaten Pinrang juga menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan ibu hamil melalui kegiatan minum Multiple Micronutrient Supplement (MMS) secara serentak. (*syabir/hans).

Kadisdik Labuhanbatu Jenguk Siswi Korban Truk Sawit di Bilah Hilir

LABUHANBATU, BN – Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu bergerak cepat memberikan perhatian kepada para siswa yang menjadi korban kecelakaan truk bermuatan kelapa sawit di Kecamatan Bilah Hilir. Mewakili Bupati Labuhanbatu dr. Hj. Maya Hasmita, Sp. OG., M.K.M., Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Labuhanbatu, Abdi Jaya Pohan, SH, mengunjungi langsung para siswi yang masih menjalani perawatan di Puskesmas Bilah Hilir, Selasa (14/7/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap peserta didik yang menjadi korban musibah. Abdi Jaya Pohan mengaku langsung bergerak menuju lokasi setelah menerima laporan dari Kepala Bidang SMP sekitar pukul 08.00 WIB.

Dalam kesempatan itu, Kadisdik menyampaikan salam serta perhatian dari Bupati Labuhanbatu kepada para korban dan keluarga. Ia berharap kehadiran pemerintah dapat memberikan semangat sekaligus dukungan moral bagi para siswi agar segera pulih dan kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar.

“Kehadiran kami merupakan wujud kepedulian dan bentuk keprihatinan atas peristiwa yang menimpa anak-anak didik,” ujar Abdi Jaya Pohan kepada wartawan.

Selain memberikan dukungan moral, Kadisdik bersama Kepala Puskesmas Bilah Hilir, Koordinator Wilayah Pendidikan, dan Kepala SMP Negeri 4 Bilah Hilir berdialog dengan keluarga korban untuk mengetahui perkembangan kondisi kesehatan serta langkah-langkah penanganan dan



Kadisdik Labuhanbatu, Abdi Jaya Pohan, SH, saat mengunjungi para siswi yang masih menjalani perawatan di Puskesmas Bilah Hilir. (sukma)

pemulihan terhadap dua siswi yang masih menjalani perawatan intensif.

Menurut Abdi Jaya Pohan, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu berkomitmen terus hadir mendampingi peserta didik yang mengalami musibah agar hak mereka memperoleh pendidikan tetap terjamin meski sedang menghadapi masa pemulihan.

Berdasarkan data yang disampaikan Dinas Pendidikan, insiden tersebut mengakibatkan 10 orang siswa menjadi korban. Tujuh siswa mengalami luka

ringan, dua siswa mengalami luka berat dan masih menjalani perawatan, sementara satu siswa dinyatakan meninggal dunia.

Di akhir kunjungannya, Kadisdik menyampaikan dukacita yang mendalam kepada keluarga korban meninggal dunia. Ia berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi cobaan tersebut.

Sementara itu, salah seorang warga Bilah Hilir menyampaikan apresiasi atas respons cepat Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Menurutnya, perhatian yang diberikan Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan menunjukkan kepedulian nyata terhadap dunia pendidikan dan keselamatan para siswa.

Warga berharap seluruh korban yang masih menjalani perawatan segera pulih dan dapat kembali bersekolah bersama teman-temannya. Ia juga mendoakan agar keluarga korban yang meninggal dunia diberikan kesabaran dan ketabahan atas musibah yang terjadi. (M.Sukma)

Bancakan Dana ...

kab Jombang,” tandas sumber BN.

Sementara bahwa kita melihat di Pemerintahan daerah khususnya di Bapenda (Pemkab Jombang) pada pembagian dana insentif untuk periode tahun 2022 – 2025, diduga tidak tergoyahkan.

Namun, sejauh ini, dugaan praktik tersebut belum terkonfirmasi. Sehingga, pertanyaan tentang kenapa jatah bawahan (mulai Sekdin hingga staf) bisa berubah-ubah dan cenderung mengecil sementara jatah pimpinan tidak tergoyahkan, itu belum terjawab.

Saat BN konfirmasi ke Sekdin Bapenda, bahwa pembagian dana insentif diatur oleh Bapenda sendiri, untuk LPJ sudah diserahkan ke BPKAD Jombang, ternyata apa yang disampaikan Joko Muji Sekdin Bapenda “bohong”.

Kepala BPKAD Jombang M. Nasrullah sendiri membantah, bahwa semua dokumen sudah diserahkan ke Bapenda Jombang, “Yang disini itu SPP, SPM dan surat pertanggung jawaban, kalau dulu dipegang di bagian keuangan semuanya kembali ke Bapenda, setelah ada Permendagri Nomor 13 tahun 2006 semua kembali ke OPD semula,” ujar Nasrullah ketika di temui BN.

Jadi kalau dicermati Sekdin Bapenda Jombang, Joko Muji diduga sengaja mengecoh Wartawan BN, agar bisa menutupi kasus dana insentif jangan sampai melebar, sedangkan ketika itu BN pun menemui Sholahuddin Kepala Bapenda ketika di konfirmasi seakan akan tidak tahu menahu soal pembagian dana tersebut. Setali tiga uang, keduanya sama saja, ingin menutupi kebusukan kasus dana insentif tersebut jangan sampai terkuak.

Saat itu juga BN mendatangi Kabag Hukum Pemkab Jombang Andi Kurniawan,SH, menyatakan SK Pembagian Dana Insentif,tetapi belum berhasil ditemui.

Sementara kalau bicara soal arsip, bisa dibaca di PP Nomor 12 tahun 2018. Mungkin, pembuat kebijakan sudah mengantongi argumen khusus terkait itu. Namun seperti apa wujudnya, sejauh ini ikhwal tersebut (jika memang ada) belum pernah nongol ke publik. Alhasil, dugaan praktik semena-mena terhadap hak bawahan menjadi tak terhindarkan.

Berdasarkan data yang dihimpun BN, pembagian insentif pajak untuk ASN dan pegawai non ASN di Bapenda Jombang dilakukan dengan cara menjumlah seluruh pos insentif pajak dan kemudian dibagikan secara prosentase kepada setiap pihak yang berhak/penerima.

Pos insentif yang dimaksud adalah pajak BPHTB, PBJT, AT, Minerba, Reklame, PKB, BBNKB, dan PBB P2. Setelah besaran insentif masing-masing bidang pajak dijumlah dan ketemu nominal, maka setiap ASN dan pegawai non ASN di Bapenda dipastikan mendapat insentif sesuai tanggungjawab dan beban kerja.

Berapa petugas/ pegawai di Bapenda yang menerima belum terjawab. Pihak BKD (Badan Kepegawaian Daerah). Pada pembagian insentif pajak 2025, pihak-pihak yang tercatat menerima insentif pajak adalah Bupati, Wakil Bupati, Kepala Bapenda (kelas jabatan 14), Sekretaris Bapenda (kelas jabatan 12), Kepala Bidang Bapenda (kelas jabatan 11), serta Ahli Muda (kelas jabatan 10).

Juga, Kasubid Bapenda (kelas jabatan 9), Kasubag Bapenda (kelas jabatan 9), Ahli Pertama (kelas jabatan 8), Staf Analis (kelas jabatan 7), Staf Verifikator (kelas jabatan 6), Staf Administrasi (kelas jabatan 5), S1 non ASN, SMA non ASN, S1 Tenaga Ahli, serta D3 tenaga ahli.

Masalah mulai muncul, atau praktik semena-mena terhadap hak bawahan diduga terjadi, karena prosentase insentif untuk bawahan (mulai Sekdin

Pungli Berkedok ...

Diancam Akun Ujian Diblokir

Bentuk intimidasi yang paling meresahkan terjadi saat menjelang pelaksanaan ujian. Sejumlah siswa kelas 12 mengaku ditekan secara psikologis. Pihak sekolah diduga mengancam akan memblokir atau tidak mengaktifkan akun ujian digital siswa jika kewajiban mencilil atau melunasi SPM tersebut belum dipenuhi.

Akibat dari pembatasan hak ujian ini, beberapa siswa dilaporkan mengalami trauma emosional yang cukup mendalam. Mereka merasa ketakutan, cemas akan masa depan pendidikannya, dan merasa diasingkan secara sosial di lingkungan sekolah hanya karena masalah finansial orang tua mereka.

Tabrak Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016

Praktik penggalangan dana yang bersifat mengikat dan wajib ini dinilai menabrak aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, penarikan dana oleh komite sekolah harus bersifat sukarela dan tidak boleh ditentukan jumlah nominal maupun batas waktu pembayarannya (bersifat sumbangan, bukan

Gerai Layanan ...

pelayanan. Program ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat pesisir dalam memenuhi legalitas usaha perikanan sekaligus mendukung keselamatan pelayaran dan kelancaran aktivitas penangkapan ikan.

Setali tiga uang, Kegiatan Pelayanan tersebut mendapat sambutan positif dari para nelayan dan pelaku usaha perikanan karena dinilai mampu mempercepat proses pengurusan dokumen tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kantor pelayanan lainnya. Dalam kegiatan ini, masyarakat dapat melakukan pengurusan dokumen seperti surat izin operasional kapal,

pemeriksaan administrasi kapal perikanan, hingga konsultasi terkait legalitas usaha penangkapan ikan. Kegiatan Gerai Layanan Perizinan Perikanan Terpadu dibuka oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember Kabupaten Jember bersama Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Puger beserta beberapa perwakilan dari instansi yang terkait didalamnya. Kegiatan ini dilaksanakan bertempat di Aula UPT PPP Puger selama 4 hari dimulai pada tanggal 18 hingga 21 Mei 2026 mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. berbagai layanan yang dapat diakses masyarakat, di antaranya pe-

hingga staf) tidak lagi sama dengan jatah pimpinan. Persisnya, jatah bawahan terjadi penurunan prosentase, sedang jatah pimpinan tidak berubah.

Potret itu, bisa dilihat pada pembagian insentif pajak PBJT tribulan III (Juli – September 2025) dan tribulan IV (Oktober – Desember 2025). Dimana, 3 pimpinan yaitu Bupati, Wakil Bupati, dan Kepala Bapenda, tetap mengantongi porsi 1,857 persen, sedang pegawai bawahan (mulai Sekdin hingga staf) terjadi penurunan prosentase.

Persisnya, pada tribulan III 2025, Sekdin mengantongi 1,625%, Kepala Bidang 1,595%, Ahli Muda 1,455%, Kasubid dan Kasubag 1,455%, Ahli Pertama 1,408%, Staf Analis 1,394%, Staf Verifikator 1,145%, Staf Administrasi 1,115%, S1 non ASN 1,084%, SMA non ASN 1,069%, S1 Tenaga Ahli 0,200%, dan D3 Tenaga Ahli 0,186%.

Sedang pada tribulan IV 2025, Sekdin mengantongi 1,394%, Kepala Bidang 1,331%, Ahli Muda 1,239%, Kasubid dan Kasubag 1,239%, Ahli Pertama 1,224%, Staf Analis 1,207%, Staf Verifikator 0,975%, Staf Administrasi 0,945%, S1 Non ASN 0,806%, SMA Non ASN 0,789%, S1 Tenaga Ahli 0,139%, dan D3 Tenaga Ahli 0,122%.

Konkritnya, jatah pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Kepala Bapenda) pada 2 tribulan tetap 6%, sedang jatah bawahan rata-rata terjadi penurunan. Yakni, Sekdin dari 5,25% ke 4,50%, Kabid dari 5,15% ke 4,30%, Ahli Muda dari 4,70% ke 4,00%, Kasubid dan Kaubag dari 4,70% ke 4,00%, Ahli Pertama dari 4,55% ke 3,95%.

Selanjutnya, Staf Analis dari 4,50% ke 3,90%, Staf Verifikator dari 3,70% ke 3,15%, Staf Administrasi dari 3,60% ke 3,05%, S1 Non ASN dari 3,50% ke 2,60%, SMA Non ASN dari 3,45% ke 2,55%, S1 Tenaga Ahli dari 0,65% ke 0,45%, serta D3 Tenaga Ahli dari 0,60% ke 0,40%.

Sebagai catatan, meski insentif pajak PBJT tidak melulu soal tenaga listrik (karena didalamnya ada insentif pajak hiburan, restoran, perparkiran, dan perhotelan), namun insentif pajak listrik mendominasi perolehan hampir 90 persen. Dengan demikian, bisa dibilang, insentif PBJT sejatinya adalah insentif pajak tenaga listrik.

“Pertanyaannya, kenapa prosentase insentif pajak listrik untuk bawahan bisa turun, sedangkan pimpinan tidak, apa dasar yang di gunakan. Seharusnya kalau memang harus turun, semuanya harus turun. Tetapi untuk level pimpinan (pejabat senior) jatahnya tidak berkurang,” ungkap salah seorang pemerhati di Pemkab Jombang yang tidak disebutkan namanya.

Lalu apa dasar Pemkab bisa menurunkan dana insentif pajak listrik para bawahan dengan seandainya?

Juga berapa besaran insentif pajak listrik yang diterima para bawahan sudah sesuai ketentuan? Kelihatannya dalam dugaan kasus dana insentif di Bapenda Jombang, para “Genk Pemkab” Jombang yang terlibat, kelihatannya kini berupaya menutupi kasus tersebut dengan berbagai modus agar terhindar dari upaya hukum.

Praktik ini biasanya dilakukan melalui penghilangan alat bukti, intimidasi sanksi, hingga rekayasa laporan keuangan, diantara nya salah satunya manipulasi laporan Pertanggungjawaban (SPJ) dan mereka masih mengatur strategi lainnya yang diduga di bawah arahan “Bos besar”?

Terkait kasus dana insentif di Bapenda Jombang kini mulai terkuak, kita akan menanti dan harus mengawal aparat penegak hukum, dalam membongkar kasus tersebut dan mengusut jejarang aktor intelektual serta terbuka secara gampang. Lebih jelasnya ikuti laporan BN pada edisi berikutnya. (Tok)

Sambungan hal 1

pungutan).

Tindakan SMKN 1 Ngasem Kediri yang mematok nominal Rp 85.000 setiap bulan jelas mencederai regulasi tersebut, terlebih jika dikaitkan dengan hak siswa untuk mengikuti evaluasi belajar atau ujian.

Kepala Sekolah Enggan Memberikan Klarifikasi

Guna mendapatkan perimbangan berita (cover both sides), tim media telah mencoba mendatangi sekolah untuk meminta konfirmasi dari pihak manajemen. Namun, hingga berita ini diturunkan, Kepala Sekolah SMKN 1 Ngasem Kediri terkesan tertutup, menghindari, dan belum bisa dikonfirmasi maupun memberikan klarifikasi resmi terkait sengkaret dugaan pungli dan dugaan intimidasi terhadap siswanya, meskipun akhirnya anak tersebut diperbolehkan mengikuti ujian.

Wali murid berharap pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur beserta jajaran penegak hukum segera turun tangan mengusut tuntas kasus ini agar psikologis anak-anak yang masih aktif dan sudah lulus dapat terselamatkan dan praktik pungli di sekolah dapat diberantas. (ND)

Sambungan hal 1

Tanjung Wangi, 8. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi, 9. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember, 10. BPJS Ketenagakerjaan, serta 11. Puskesmas Puger.

Bupati Jember turut mendukung penuh pelaksanaan gerai pelayanan terpadu ini sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih dekat, cepat, dan efisien kepada masyarakat nelayan. Kehadiran layanan terpadu tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan administrasi kapal perikanan sekaligus mendorong terciptanya sektor perikanan yang tertib, aman, dan berkelanjutan.

PPATK ...

(Jampidsus) Febrie Adriansyah, tersangka perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) kasus batu bara, PT Asabri, serta Krakatau Steel.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan lembaganya siap berkolaborasi dengan aparat penegak hukum (APH) untuk menelusuri aliran dana mantan Jampidsus tersebut. “Kami siap membantu,” katanya meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) untuk siswa disabilitas di Sekolah Khusus Negeri 01 Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (16/7/2026).

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menerbitkan tiga surat perintah penyidikan (sprindik) terkait dugaan korupsi dan TPPU yang menjerat Febrie Adriansyah. Kejagung menegaskan penerbitan sprindik tersebut tidak mengubah status tersangka yang sebelumnya telah ditetapkan Polri.

Tiga sprindik itu diterbitkan setelah kepolisian menyerahkan penanganan perkara kepada Kejagung. Tim gabungan telah menggeledah 13 lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Dari rangkaian pengeledahan itu, penyidik menyita uang tunai dalam jumlah besar, emas batangan, serta berbagai barang bukti lainnya.

Salah satu lokasi yang digeledah di kawasan Parahyangan Golf, Babakan Madang, Kab Bogor. Penyidik menemukan 74 kg emas batangan, uang tunai sebesar US\$ 4.767.300, 14.083.800 dolar Singapura (SGD), uang tunai Rp 100 juta, serta sejumlah barang lain yang turut diamankan sebagai barang bukti. (sumber: beritasatu.com/red)

Pilkades Sumenep ...

Sambungan hal 4

(perbup). “Jadi belum bisa dipastikan seperti apa teknis pelaksanaannya,” ucapnya.

Lanjut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep bahwa aturan yang dibuat Kemendagri nantinya akan dijadikan dasar hukum oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menyusun aturan Peraturan Bupati.

Pemerintah dalam melakukan tindakan Pikades selalu berpegang pada aturan yang diterbitkan Kemendagri, maka seluruh tahapan, mulai dari jadwal, mekanisme pencalonan, hingga pelaksanaan di lapangan nanti.

Harapan kami atas nama Pemerintah Sumenep semoga dalam pelaksanaan nanti berjalan sesuai dengan mekanisme yang sudah ditentukan, semua peserta calon pilkades menerima keputusan yang sudah ditentukan oleh panitia Pilkades di desanya (kondusip). (yus)

Progres Tender ...

Sambungan hal 6

berisiko tinggi terhadap hilangnya izin operasional serta penghentian total pelayanan kesehatan,” ujar Zaenuri ketua GNPK RI Pekalongan Raya.

Zaenuri menambahkan, faktor utama yang mengikat situasi kritis ini adalah status hukum lahan gedung lama dan batas waktu mutlak yang diberikan oleh pemilik tanah.Kemudian dirinya berpendapat tentang Korelasi Risiko: Mengapa Izin Operasional Bisa Hilang?

Ditambahkan Zaenuri, masalah Sengketa Lahan Gedung Lama: Pemerintah Kabupaten Pekalongan kalah dalam gugatan sengketa lahan RSUD Kraton lama di Kota Pekalongan melawan Yayasan Kesusteran (Yayasan Santa Bunda Maria).

Akibatnya, izin operasional di gedung lama tidak dapat diperpanjang lagi karena terbentur syarat kepemilikan/penguasaan lahan yang sah.

Batas Waktu Mutlak Akhir 2026: Berdasarkan kesepakatan hukum, RSUD Kraton lama diberikan tenggat waktu yang sangat ketat. Rumah sakit dilarang menerima pasien baru mulai Oktober 2026 dan lokasi lama harus dikosongkan total pada Desember 2026.

Dalam Analisanya, Dampak Pembangunan Gedung Baru Mundur, Konsekuensinya Realokasi Akan Mundur

Apabila pembangunan tahap akhir di Wiradesa meleset dari target 15 Desember 2026, akan terjadi kekosongan ruang pelayanan (deadlock). Rumah sakit tidak bisa lagi beroperasi di gedung lama karena izin penggunaan lahannya habis, sementara gedung baru belum siap mengurus izin operasional relokasi yang baru.

Status Target Relokasi Saat Ini (Tahun 2026) Pemerintah Daerah dan Manajemen RSUD Kraton saat ini tengah mengejar target fisik yang sangat ketat untuk menghindari hilangnya layanan kesehatan masyarakat : Fase Krusial Tahap 3 : Pembangunan gedung baru di Desa Kampil, Wiradesa, saat ini berada di tahap akhir dengan fokus pengerjaan fisik, dipertanyakan kemampuan mengejar target rampung.

“Transisi utama yang dihadapi menejemen pelayan rumah sakit adalah Oktober 2026. Penghentian penerimaan pasien baru di gedung lama. Desember 2026. Batas akhir penyelesaian fisik gedung baru dan pengosongan gedung lama. Januari 2027. Target pemindahan sistem dan mulai beroperasinya layanan fungsional di Wiradesa. Mampukah?” tutupnya. (Dikin)

Bupati Subandi ...

Sambungan hal 12

Bupati mengatakan, Jalan Raya Bluru Kidul mendapat atensi khusus karena selama bertahun-tahun menjadi titik rawan banjir yang melumpuhkan aktivitas warga. Padahal, ruas tersebut merupakan urat nadi menuju pusat pelayanan publik, termasuk Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sidoarjo. “Peningkatan Jalan Bluru Kidul ini prioritas utama karena setiap musim hujan kawasan ini selalu tergenang. Akses warga menuju pusat pelayanan jadi lumpuh. Karena itu, penanganannya wajib dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi,” ujarnya.

Ia membeberkan, saking mendesaknya proyek ini, Pemkab Sidoarjo bahkan melakukan pengalihan alokasi anggaran (shifting budget) yang semula diplot untuk penanganan jalan di Kecamatan Sedati.

Proyek ini tidak sekadar menaikkan elevasi badan jalan, melainkan sepaket dengan revitalisasi sistem drainase makro. Secara teknis, Jalan Raya Bluru Kidul akan dilebarkan menjadi 11 meter, dengan rincian perkerasan beton (rigid pavement) selebar 6 meter, serta dilengkapi bahu jalan dan trotoar di kedua sisi.

Tak hanya itu, Pemkab Sidoarjo juga tengah mengkaji Detail Engineering Design (DED) sistem pembuangan air menuju muara sungai, termasuk opsi pembangunan tanggul pengaman banjir rob.

“Meninggikan jalan saja tidak cukup. Drainasenya harus terkoneksi ke saluran pembuangan akhir di sungai agar aliran air lancar. Antisipasi pasang air laut (rob) juga sedang kami kaji matang-matang sebagai solusi jangka panjang,” imbuh Bupati.

Sejalan dengan proyek fisik, Pemkab Sidoarjo juga akan melakukan sterilisasi dan penataan kawasan. Kedepannya, badan dan bahu jalan Raya Bluru Kidul akan difungsikan mutlak untuk lalu lintas kendaraan, sehingga aktivitas perdagangan yang memakan hak jalan tidak lagi ditoleransi demi mengurai kemacetan.

Bangunan yang kedapatan melanggar ruang milik jalan (Rumija) akan segera didata. Subandi menjamin proses ini akan mengedepankan pendekatan persuasif melalui koordinasi dengan pemcam, pemdes, hingga pengurus RT/RW setempat.

“Kami data dulu secara humanis melibatkan pemerintah desa. Penataan ini dilakukan agar fungsi jalan kembali optimal, namun hak-hak masyarakat juga tetap kita perhatikan,” tegasnya.

Ia menargetkan seluruh paket pekerjaan kelar pada Desember 2026. Ia optimistis target tersebut tercapai asalkan mitigasi cuaca berjalan baik dan pihak rekanan bekerja sesuai spesifikasi teknis (spek). (Ted)

Kegiatan ini juga men-

jadi wujud sinergi antara pemerintah daerah dan instansi pelabuhan perikanan dalam memperkuat sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu potensi unggulan Kabupaten Jember. Dengan pelayanan yang terintegrasi, para nelayan diharapkan semakin terbantu dalam mengurus legalitas usaha sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Sementara itu, perwakilan nelayan Kabupaten

Jember berharap pelaya-

nan terpadu seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkala karena kegiatan ini sangat membantu mempermudah nelayan dalam mengurus kelengkapan dokumen kapal perikanan sehingga membuat nelayan merasa lebih mudah dan aman dalam melakukan penangkapan ikan di laut, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan Kabupaten Jember.

Selain pelayanan perizinan kapal perikanan,

kegiatan ini juga didukung oleh Puskesmas Puger yang membuka pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat nelayan yang ingin melakukan pengecekan kesehatan secara gratis.

Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan pelayanan dokumen kapal perikanan dapat berjalan lebih efektif, cepat, dan transparan, sekaligus mendukung pengembangan sektor perikanan tangkap yang menjadi salah satu potensi unggulan di Kabupaten Jember. (adv/dkp)

Gertek 2026, Mas Dhito Hadirkan Teknologi Pertanian Terbaru Untuk Petani



Gertek 2026, Mas Dhito Hadirkan Teknologi Pertanian Terbaru untuk Petani

KEDIRI, BN - Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menunjukkan komitmennya untuk memajukan petani supaya lebih berdaya saing melalui Gelar Inovasi dan Teknologi Pertanian (Gertek) 2026.

Kegiatan yang diadakan di Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan pada Senin (6/7) ini menghadirkan lebih dari 77 perusahaan. Perusahaan ini bergerak di bidang benih unggul, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian hingga sektor perbankan.

Hadirnya perusahaan-perusahaan ini, petani juga ditunjukkan berbagai inovasi pertanian baik itu melalui demplot, pameran dan demo

alat mesin pertanian modern. Selain itu, petani juga mendapatkan informasi mengenai akses permodalan.

“Hadirnya perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi dalam Gertek ini, petani juga semakin dimudahkan untuk memilih, semisal benih unggul yang sesuai,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Mohamad Solikin.

Mengusung tema “Pertanian Modern untuk Swasembada Pangan Berkelanjutan” fokus Gertek 2026 ini, mendorong transformasi sektor pertanian agar lebih maju, efisien, dan berdaya saing.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, Gertek 2026 digelar dengan skala lebih besar. Sebanyak 14 ribu petani dilibatkan, adapun 6 ribu diantaranya juga mengikuti kegiatan temu tani selama tujuh hari yang terbagi dalam 150 kelas pembelajaran.

Menurut Solikin, Gertek ini merupakan wujud dukungan bupati Mas Dhito terhadap program ketahanan pangan nasional sekaligus upaya meningkatkan kesejahteraan petani melalui berbagai inovasi pertanian.

Disisi lain, Mas Dhito juga terus mendorong peningkatan produktivitas pertanian melalui berbagai bantuan. Mulai dari bantuan benih padi, jagung, penyaluran raturan alat dan mesin pertanian pada 2025 dan 2026, hingga sarana pendukung lainnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dispertabun Kabupaten Kediri Sukadi mengatakan Gertek 2026 yang berlangsung pada 6-12 Juli menjadi sarana percepatan informasi terkait inovasi teknologi pertanian.

“Tujuannya supaya para petani, khususnya anak muda, bisa melihat langsung perkembangan teknologi pertanian terbaru,” bebernya.

Di lokasi yang sama, Direktur Perbenihan Tanaman Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Tommy Nugraha menilai Kabupaten Kediri memiliki potensi besar di sektor pertanian.

“Kondisi lahan yang ada di sini mampu diatasi dengan teknologi yang tersedia saat ini. Tinggal bagaimana teknologi itu bisa menjawab tantangan di lapangan,” terangnya.

(AdvKominfokabkd/ND)

Beasiswa Dari Mas Dhito Banyak Peminat, Tim Verifikasi Pastikan Kondisi Riil Pemohon



Beasiswa dari Mas Dhito Banyak Peminat, Tim Verifikasi Pastikan Kondisi Riil Pemohon

KEDIRI, BN - Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana sangat serius memperhatikan pendidikan bagi warganya dengan mengalokasikan anggaran untuk program beasiswa mencapai Rp 30 miliar/tahun. Memastikan bantuan diterima keluarga yang membutuhkan, proses verifikasi dilakukan dengan melakukan home visit atau kunjungan ke rumah calon penerima.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan beasiswa pendidikan ini tepat sasaran dan tidak sekedar berpatoakan pada dokumen administrasi yang bisa

tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Adapun proses verifikasi dilakukan mulai 29 Juni lalu.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Mokhamat Muhsin menyebut, verifikasi kali ini dilakukan untuk jenis beasiswa berdaya jenjang mahasiswa. Dia pun menekankan, proses yang dilakukan tersebut bukan untuk mempersulit, namun memastikan kondisi riil calon penerima

“Kita tidak menginginkan bantuan beasiswa ini tidak tepat sasaran, sehingga mereka yang lebih berhak justru kehilangan kesempatan,” katanya, Rabu (8/7/2026).

Mengingat jumlah pendaftar yang mengajukan beasiswa tak sebanding dengan kuota, tak dipungkiri hasil verifikasi banyak juga yang tidak lolos. Sebagai contoh, untuk beasiswa berdaya kuota untuk jenjang mahasiswa 580 penerima.

Dari kuota itu, untuk tahap pertama pemohon beasiswa mencapai 1.246 pendaftar. Dari proses verifikasi yang telah berjalan, mereka yang tidak lolos verifikasi 780 pendaftar, dan 245 sudah terverifikasi.

Proses verifikasi untuk pendaftaran beasiswa berdaya tahap pertama ini pun terus berjalan hingga 18 Juli mendatang dan nantinya akan dilanjutkan untuk tahap kedua. Selain dokumen administrasi, petugas verifikasi dari Dinas Pendidikan juga melakukan pengecekan kondisi ekonomi keluarga (Desil 1-5), prestasi akademik, maupun kondisi pemohon.

“Verifikasi ini menjadi penentu, kita berharap betul manfaat program beasiswa benar-benar dirasakan bagi mereka yang kesulitan biaya pendidikan,” ungkapny.

Muhsin menambahkan, Mas Dhito selaku Bupati Kediri selalu menekankan anak-anak di Kabupaten Kediri memiliki kesamaan hak untuk bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.

Sebagaimana program beasiswa berdaya diharapkan bisa menjadi jembatan bagi mereka yang berprestasi untuk tetap bisa sekolah dan meraih mimpi. (AdvKominfokabkd/ND)

Enam Pejabat Eselon II Pemprov Jatim Dilantik



Salah satu pejabat, I Nyoman Gunadi sedang menandatangani SK Pelantikan jabatan barunya di depan Gubernur Khofifah (dji)

SURABAYA, BN - Enam pejabat eselon II dilantik Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa Selasa (13/7) sore ini di Gedung Negara Grahadi jalan Pemuda 7 Surabaya. Ke-6 pejabat yang dilantik itu masing-masing: 1. Heru Wahono Santoso, S.Sos., M.M Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, 2. Dr. Iwan, S.Hut., M.M. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, 3. Budi Raharjo, S.E., M.Si. Kepala Bakorwil Jember Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya 4. | Nyoman Gunadi,

S.T., M.T. Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, 5. Arif Endro Utomo, S.T., M.T. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, dan 6. Dr. MHD. Aftabuddin Rijaluzzaman, S.Pt, M.Si. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur.

Dalam sambutannya Khofifah mengatakan, kalau mutasi tersebut dilakukan untuk memperkuat efektivitas organisasi sekaligus memastikan roda pemerintahan tetap berjalan optimal sesuai kebutuhan pembangunan daerah. Khofifah menegaskan, seluruh perpindahan jabatan! Kali ini murni merupakan rotasi, bukan promosi. (dji)

Bupati Subandi Kebut Proyek Jalan Bluru Kidul, Sistem Drainase Prioritas



Bupati Subandi saat sidak proyek jalan Bluru Kidul. (Teddy Syah)

SIDOARJO, BN - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus memacu pembangunan infrastruktur demi mendorong kualitas pelayanan publik sekaligus menuntaskan persoalan genangan air di sejumlah wilayah strategis. Salah satu proyek prioritas yang tengah disebut saat ini adalah peningkatan Jalan Raya Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo.

Untuk memastikan proyek berjalan sesuai target, Bupati Sidoarjo Subandi

meninjau lokasi pengerjaan dengan didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) serta jajaran Forkopimka, Senin (13/7). Inspeksi mendadak ini menegaskan komitmen Pemkab Sidoarjo dalam mengawal proyek agar selesai tepat waktu dan berdampak instan bagi masyarakat.

■ Bersambung ke hal.11 kol.5

Janggal, Lelang Proyek GOR Pakansari dan Lapangan Tembak Gunakan Sistem Tender Mini Competition, Dispora – Kontraktor Diduga Kongkalikong



OGOR, BN - Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor Disorot, fasalnya, pengerjaan lelang proyek GOR Pakansari dan lapangan tembak diduga kuat pemenang tender (pihak kontraktor) sudah disiapkan, melalui metode Mini Compotition.

MENURUT sumber Bidik Nasional (BN) yang berasal dari pemerhati pembangunan Kab Bogor yang tak bersedia disebut identitasnya mengatakan, proyek untuk lapangan tembak menggunakan dana APBD Kab Bogor senilai Rp. 12 Miliar sedang Proyek perbaikan bagian atas (atap) GOR Pakansari, karena beberapa bulan yang lalu diterjang angin puting beliung senilai Rp. 8 Miliar,

Edisi minggu lalu koran dan media on line BN soroti tentang sejumlah pekerja

proyek perbaikan atap GOR Pakansari sari sudah mulai dikerjakan, padahal pemenang tender proyek belum ada. Dalam satu minggu terakhir tiba-tiba heboh pemenang tender melalui metode Mini Compotition.

Menurut sumber BN lain yang berasal dari beberapa kontraktor tak bersedia ditulis identitas dirinya mengatakan, lelang proyek melalui Mini Competition memang bisa dan dibenarkan, namun proyek ini dicurigai karena sebelum diadakan lelang proyek sudah dikerjakan,



Gedung Kantor Dispora Kab Bogor, Komplek GOR Pakansari Cibinong Kab Bogor

sehingga mengundang pertanyaan dari kalangan masyarakat Kab Bogor.

“Menurut informasi awalnya proyek GOR Pakansari dan lapangan tembak akan diatur melalui pikir anggota DPRD Kab Bogor, namun batal dirubah menjadi

sistem Mini Competition, dan diduga kuat telah terjadi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,” kata sumber BN.

Sementara pada Senin (13/7/2026), puluhan Mahasiswa gelar demonstrasi didepan gedung Dispora Kab Bogor menolak metode Mini



-Puluhan Mahasiswa Gelar Demonstrasi di Depan Kantor Dispora Kabupaten Bogor, Senin, (13/7/2026)

Competition (Pengondisian) dan segera priksa Alwi sebagai PPK Dispora Kab Bogor.

Kepala Dinas Pemuda dan olahraga Asnan dan Alwin sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dispora Kab Bogor ketika dihubungi BN lewat telepon selulernya tidak

menjawab, padahal status telpon aktif (berdering).

“Kepala Dinas dan pk Alwin tidak ada ditempat, ada di gedung GOR Pakansari sedang gotong royong disekitar GOR,” ujar Security Andreas kepada BN.

(eml)